



**KEPUTUSAN JEPANG UNTUK MELAKUKAN KERJASAMA DALAM
PENGUNAAN ENERGI NUKLIR SECARA DAMAI DENGAN INDIA
(*JAPAN'S DECISION TO UNDERTAKE COOPERATION IN
THE PEACEFUL USES OF NUCLEAR ENERGY WITH INDIA*)**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ilmu Sosial

oleh

A'idatulhaqq Adi Nastiti

120910101053

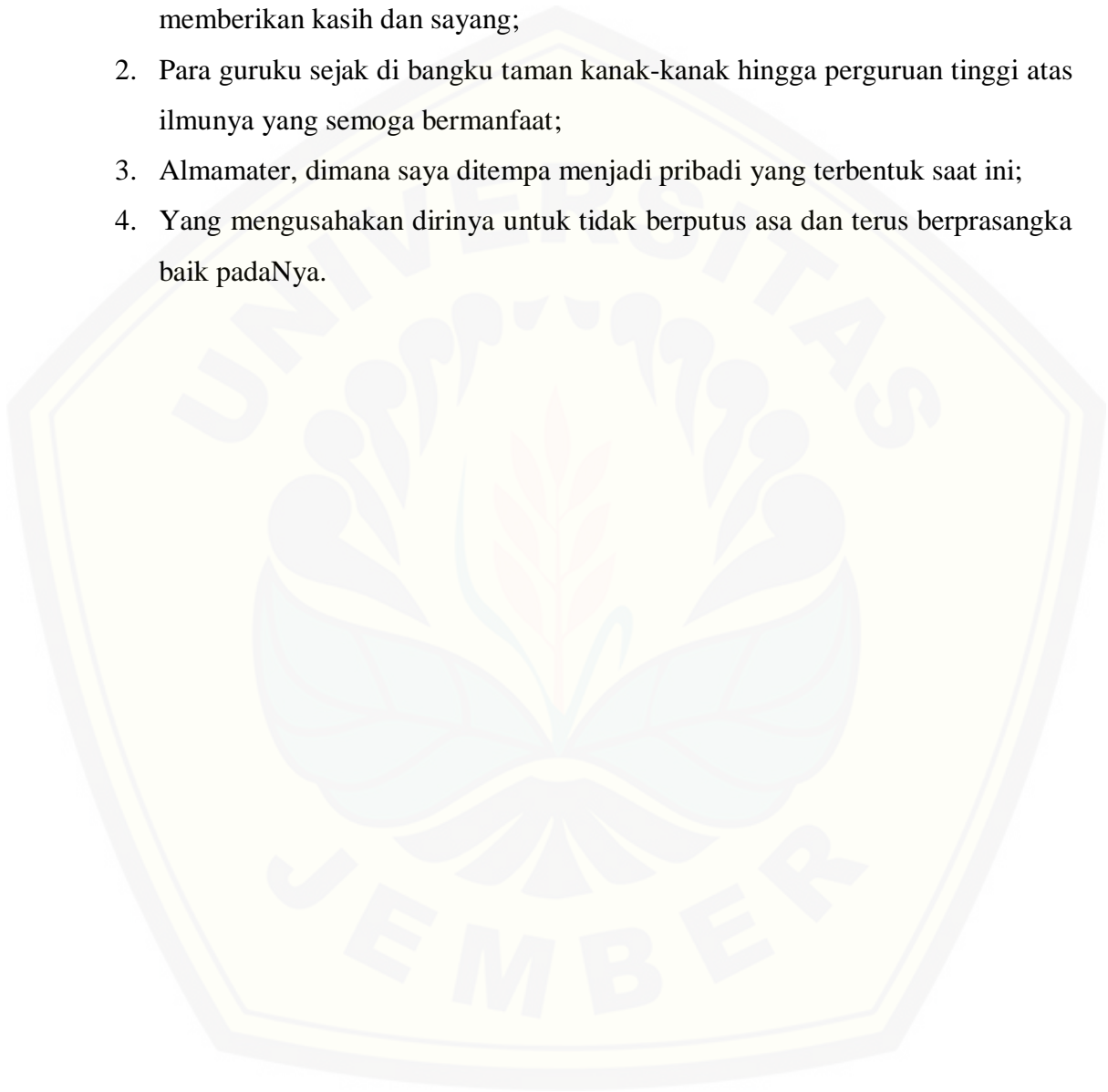
**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibu dan bapakku tercinta yang tanpa lelah terus bersabar dan tiada jenuh memberikan kasih dan sayang;
2. Para guruku sejak di bangku taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi atas ilmunya yang semoga bermanfaat;
3. Almamater, dimana saya ditempa menjadi pribadi yang terbentuk saat ini;
4. Yang mengusahakan dirinya untuk tidak berputus asa dan terus berprasaangka baik padaNya.



MOTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

- Q.S Al-Insyirah 5-6*)



* Departemen Agama Republik Indonesia. 1992. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Gema Risalah Press

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A'idatulhaqq Adi Nastiti

NIM : 120910101053

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Keputusan Jepang Untuk Melakukan Kerjasama Dalam Penggunaan Energi Nuklir Secara Damai dengan India” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi apabila ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Juni 2019

Yang menyatakan,

A'idatulhaqq Adi Nastiti

NIM 120910101053

SKRIPSI

**KEPUTUSAN JEPANG UNTUK MELAKUKAN KERJASAMA DALAM
PENGUNAAN ENERGI NUKLIR SECARA DAMAI DENGAN INDIA**

oleh

A'IDATULHAQQ ADI NASTITI

NIM 120910101053

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Agus Trihartono, S.Sos, M.A, Ph.D

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A, Ph.D

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Keputusan Jepang Untuk Melakukan Kerjasama Dalam Penggunaan Energi Nuklir Secara Damai dengan India**” telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 03 Juli 2019

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua

Drs. Agung Purwanto, M.Si

NIP 196810221993031002

Anggota I

Anggota II

Drs. Abubakar Eby Hara, M.A, Ph.D

NIP 196402081989021001

Dr. Linda Dwi Eriyanti, S.Sos, M.A

NIP 197708102006042003

Mengesahkan,

Penjabat Dekan

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.

NIP 196106081988021001

RINGKASAN

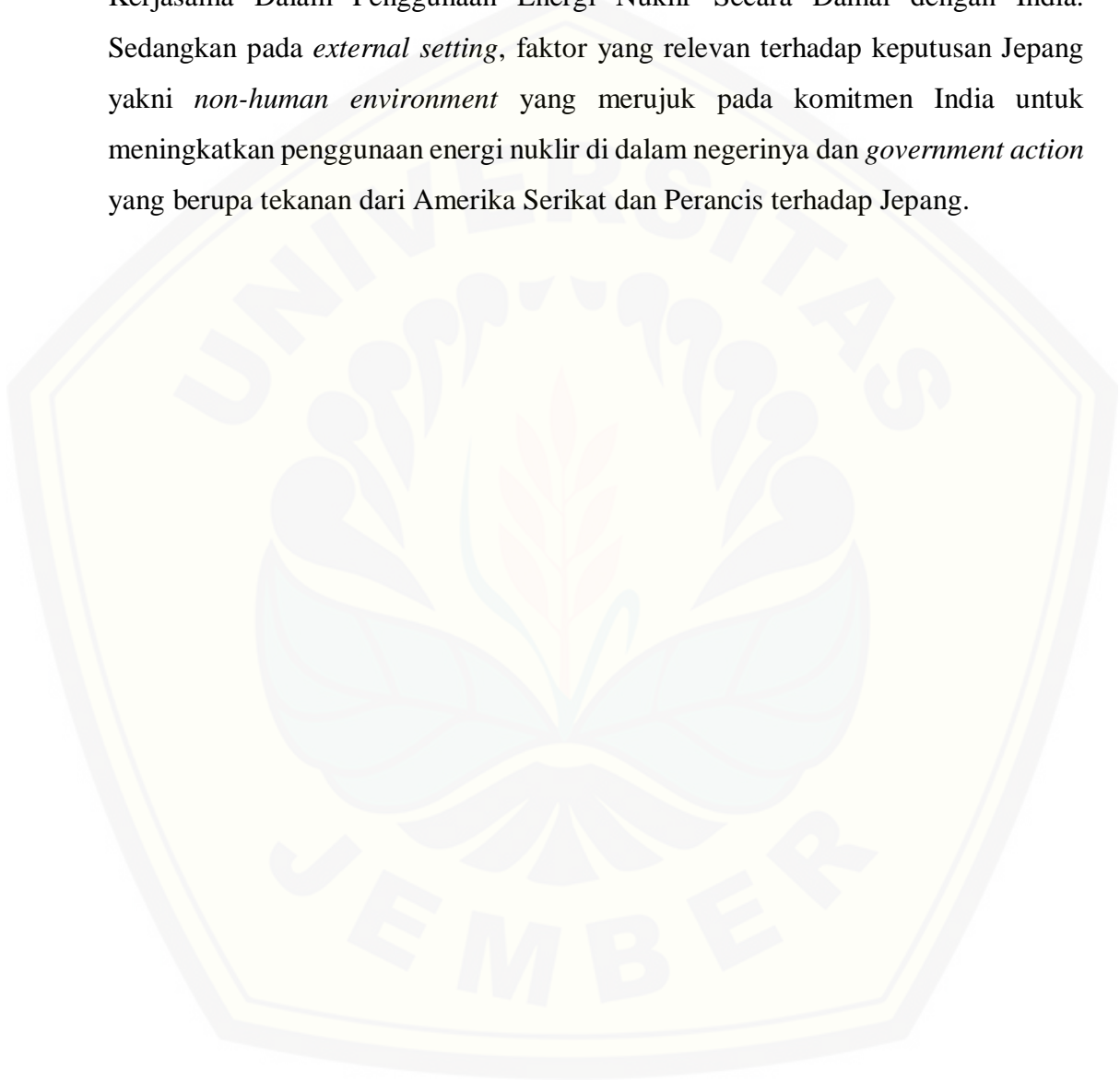
Keputusan Jepang Untuk Melakukan Kerjasama Dalam Penggunaan Energi Nuklir Secara Damai dengan India; A'idatulhaqq Adi Nastiti, 120910101053; 2019; 73 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Jepang merupakan salah satu negara terkemuka dalam industri nuklir di dunia. Ia mampu menghasilkan tenaga nuklir untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negerinya dan memproduksi teknologi nuklir yang dipasarkan pada negara lain. Meski demikian, karena pengalaman pahit dengan senjata nuklir di masa lampau, Jepang membatasi penggunaan nuklirnya pada tujuan yang damai. Sikap tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk kerjasama nuklir yang hanya dilakukan dengan negara-negara anggota rezim non-proliferasi nuklir. Akan tetapi, pada tahun 2015, Jepang membuat catatan baru dengan menandatangani nota kesepahaman mengenai kerjasama dalam penggunaan energi nuklir secara damai dengan India. Melalui tanda tangan tersebut, Jepang menyepakati untuk mengekspor teknologi nuklirnya ke India yang notabene bukan merupakan negara anggota rezim non-proliferasi nuklir. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor dibalik keputusan Jepang tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian kualitatif. Metode tersebut meliputi teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Teknik pengumpulan data yang dimaksud merujuk pada studi pustaka (*library research*) yang digunakan untuk memperoleh data-data sekunder mengingat adanya keterbatasan untuk mendapatkan data dari sumber secara langsung. Data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif untuk dapat menjawab masalah yang telah dirumuskan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor dari *internal* dan *external setting* dalam keputusan Jepang untuk melakukan kerjasama dalam penggunaan energi nuklir secara damai dengan India. Dalam *internal setting*, faktor yang relevan terhadap keputusan Jepang yaitu *major institutional patterns*. Faktor

tersebut merujuk pada hubungan kolusif antara tiga perusahaan Jepang penghasil teknologi nuklir, *Liberal Democratic Party of Japan* sebagai bagian dari koalisi yang berkuasa, dan Perdana Menteri Shinzo Abe. Hubungan antar aktor yang telah disebutkan menciptakan sebuah mekanisme yang menunjang tercapainya Kerjasama Dalam Penggunaan Energi Nuklir Secara Damai dengan India. Sedangkan pada *external setting*, faktor yang relevan terhadap keputusan Jepang yakni *non-human environment* yang merujuk pada komitmen India untuk meningkatkan penggunaan energi nuklir di dalam negerinya dan *government action* yang berupa tekanan dari Amerika Serikat dan Perancis terhadap Jepang.



PRAKATA

Puji syukur tiada hingga kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Keputusan Jepang Untuk Melakukan Kerjasama Dalam Penggunaan Energi Nuklir Secara Damai dengan India”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. Dalam penulisan, skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan beragam pihak. Oleh karena itu, melalui tulisan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Agus Trihartono, S.Sos, M.A, Ph.D, selaku Dosen Pembimbing Utama dan bapak Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A, Ph.D selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah membimbing dengan sabar dan meluangkan waktu, pikiran, serta perhatiannya terhadap penulisan skripsi ini;
2. Bu Adhiningasih Prabhawati, S.Sos, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingannya selama penulis menjadi mahasiswa;
3. Bapak dan ibu dosen di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa;
4. Bapak Honest Dody Molasy, S.Sos, M.A selaku dosen di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, yang tanpa beliau sadari sempat membantu penulis untuk terus melanjutkan langkah yang telah diambil dan kembali memiliki kepercayaan terhadap kapabilitas diri;
5. Bapak Dr. Muhammad Iqbal, S.Sos, M.Si, selaku dosen di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatiannya untuk para mahasiswa yang berada dalam “*injury time*”;
6. Sesama mahasiswa angkatan 2012 di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember yang telah menjadi

teman dalam berbagi dan berdiskusi selama masa studi, khususnya dalam penyelesaian skripsi ini;

7. Para karyawan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, yang telah membantu penulis dalam perihal administratif selama masa studi;
8. Kedua orang tua dan adik tersayang yang selalu berusaha untuk mengerti, bersabar, dan memberikan dukungan dalam situasi dan kondisi yang penulis hadapi;
9. Rifqa Ayudiah Choirun Nisa' dan Reni Yulianingtyas yang menjadi teman dalam bertukar cerita dan seringkali memberi tumpangan tempat untuk berteduh, beribadah, atau beristirahat di sela-sela kesibukan studi;
10. Gagas Argo Sasongko yang senantiasa memberi dukungan dan menjadi teman baik dalam senang maupun susah;
11. *Last but not least*, semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuan dan dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan potensi kesalahan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menerima segala kritik yang membangun dan saran demi kesempurnaannya. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat membawa manfaat.

Jember, 20 Juni 2019

Penulis

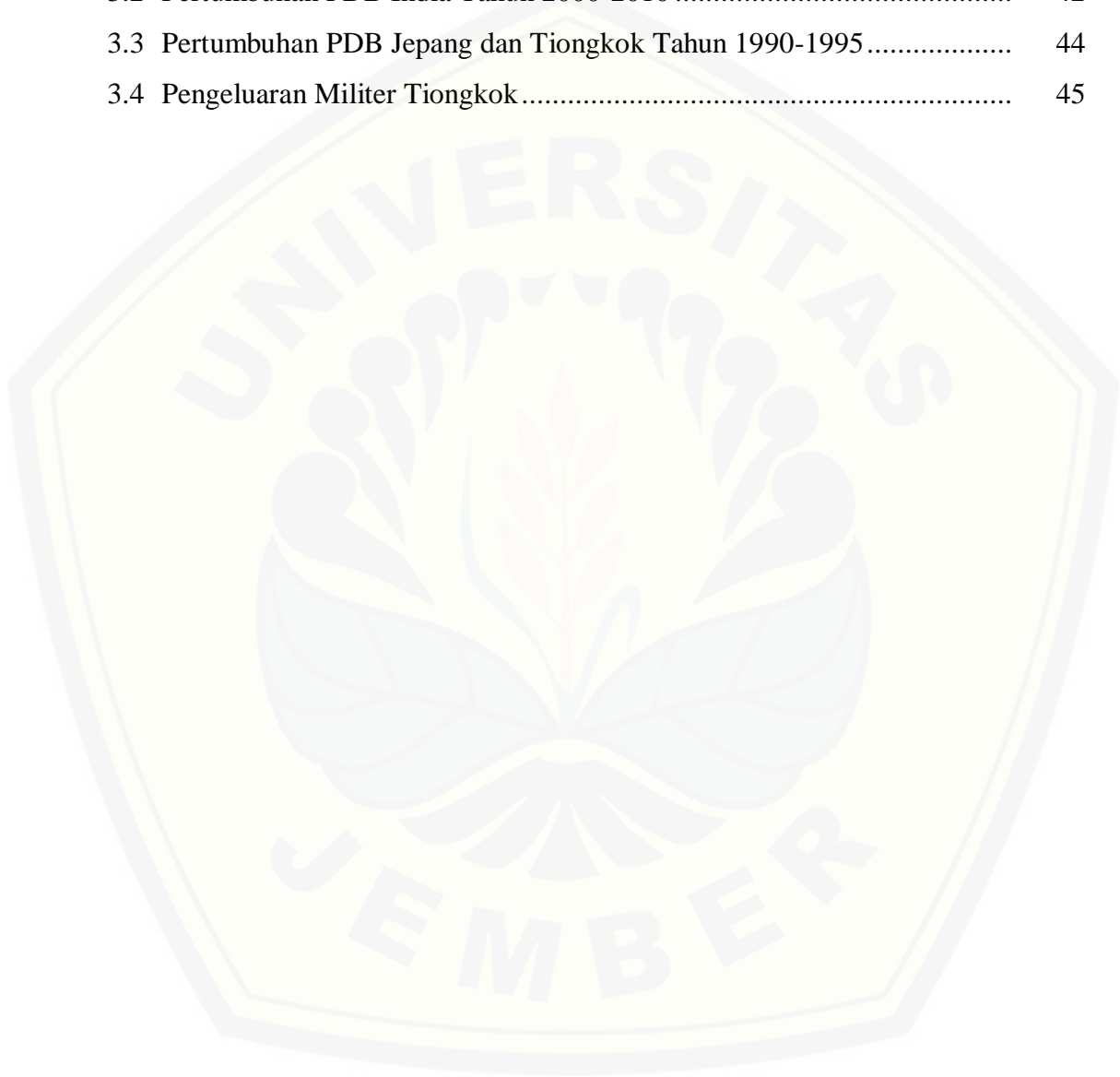
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	6
1.2.1 Batasan Materi	6
1.2.2 Batasan Waktu	6
1.3 Rumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Landasan Teori	7
1.5.1 <i>Decision Making Approach</i>	8
1.6 Argumen Utama	13
1.7 Metode Penelitian	13
1.7.1 Teknik Pengumpulan Data	13
1.7.2 Teknik Analisis Data	14
1.8 Sistematika Penulisan	14
BAB 2. SIKAP POLITIK JEPANG TERHADAP NUKLIR	16

2.1 Kebijakan Nuklir Jepang	16
2.2 Segitiga Besi Jepang	21
2.3 Para Pengambil Keputusan.....	27
BAB 3. KEBANGKITAN INDIA SEBAGAI AKTOR GLOBAL	34
BAB 4. FAKTOR DI BALIK KEPUTUSAN JEPANG	47
4.1 Internal Setting.....	48
4.2 External Setting	55
BAB 5. KESIMPULAN	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN	73

DAFTAR TABEL

2.1 Biaya untuk menghasilkan listrik	17
3.1 Kunjungan Kenegaraan Antara Jepang dan India.....	40
3.2 Pertumbuhan PDB India Tahun 2000-2010	42
3.3 Pertumbuhan PDB Jepang dan Tiongkok Tahun 1990-1995	44
3.4 Pengeluaran Militer Tiongkok.....	45



DAFTAR GAMBAR

1.1 Keterkaitan antara <i>intenal setting</i> dan <i>external setting</i> dalam pengambilan keputusan.....	10
1.2 Visualisasi hubungan antar aktor dalam <i>iron triangle</i>	24

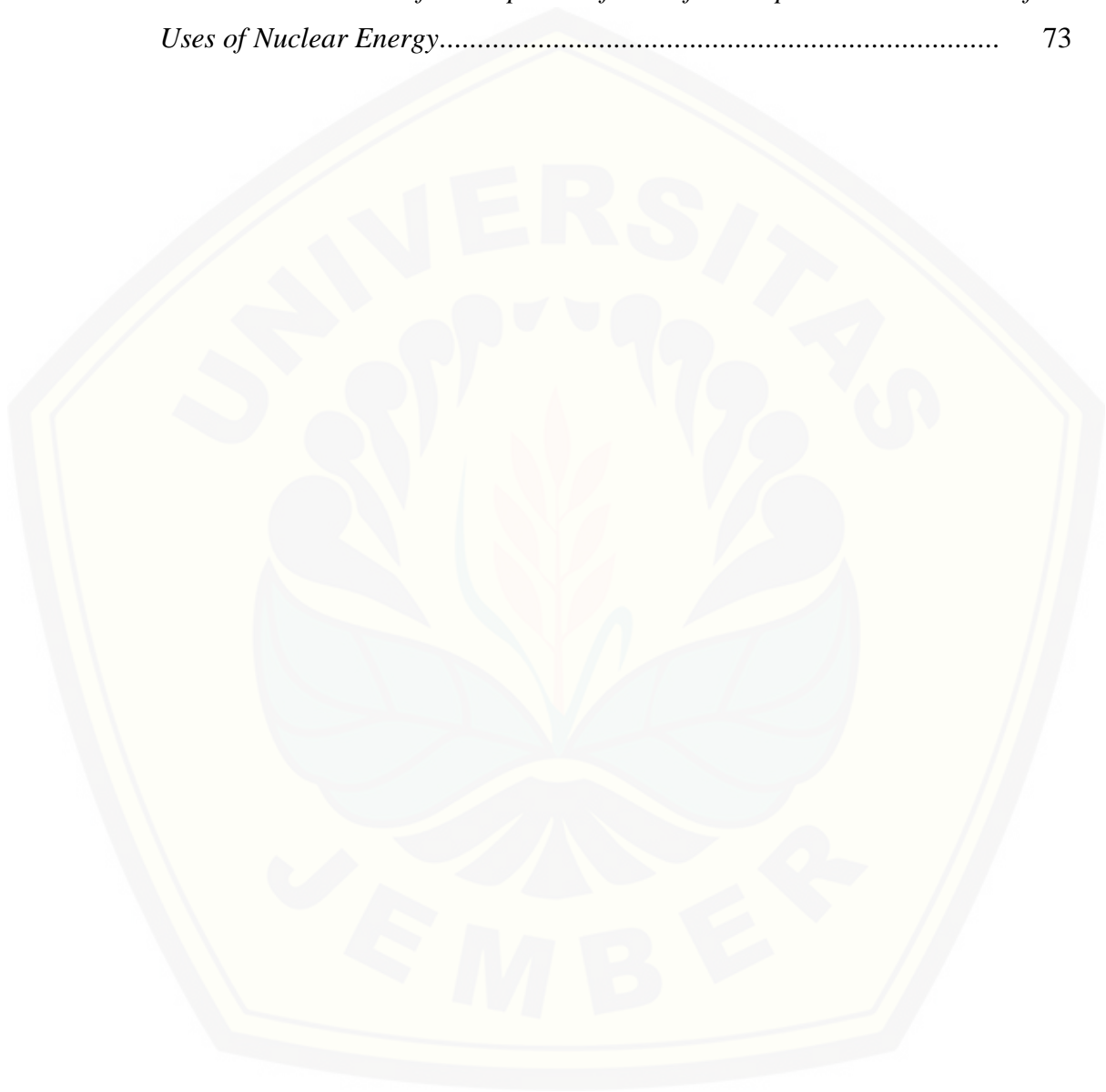


DAFTAR SINGKATAN

AEC	: <i>The Atomic Energy Commission</i>
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BRIC	: <i>Brazil, Russia, India, and China</i>
CTBT	: <i>Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty</i>
DPJ	: <i>Democratic Party of Japan</i>
EURATOM	: <i>The European Atomic Energy Community</i>
FDI	: <i>Foreign Direct Investment</i>
IAEA	: <i>International Atomic Energy Agency</i>
IMF	: <i>The International Monetary Fund</i>
JAERI	: <i>Japan Atomic Energy Research Institute</i>
JETRO	: <i>Japan External Trade Organization</i>
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
LDP	: <i>Liberal Democratic Party</i>
METI	: <i>Ministry of Economy, Trade, and Industry</i>
MITI	: <i>Ministry of International Trade and Industry</i>
NISA	: <i>Nuclear and Industrial Safety Agency of Japan</i>
NPT	: <i>Non-nuclear Proliferation Treaty</i>
NSC	: <i>Nuclear Safety Commission</i>
NSG	: <i>Nuclear Suppliers Group</i>
ODA	: <i>Official Development Assistance</i>
OECD	: <i>The Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa
PLTN	: Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
SAARC	: <i>South Asian Association for Regional Cooperation</i>
TEPCO	: <i>Tokyo Electric Power Company</i>

DAFTAR LAMPIRAN

- A. *Memorandum concerning the Agreement between the Government of Japan and the Government of the Republic of India for Cooperation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy*..... 73



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akhir Perang Dunia II menjadi masa yang tidak dapat dilupakan oleh Jepang. Serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki tidak hanya meluluhlantahkan kedua kota tersebut dan menelan korban jiwa yang sangat banyak, namun juga meninggalkan dampak jangka panjang berupa *nuclear allergy* pada bangsa tersebut. Meski demikian, Jepang kini menjadi satu diantara jajaran negara yang terdepan dalam mengembangkan tenaga nuklir (Jacobs, 2014). Sebut saja kerjasama dalam penggunaan energi nuklir secara damai dengan India sebagai salah satu contoh mutakhir. Adanya kerjasama tersebut tidak lepas dari hubungan bilateral kedua negara yang sedang bersemi dalam dekade terakhir. Kecenderungan tersebut tampak jelas setelah tahun 2005, tepatnya saat Perdana Menteri Koizumi mengunjungi India (Horimoto, 2015). Jumlah kunjungan dalam tahun 2005-2009 mencapai lebih dari dua kali lipat dari kurun waktu lima tahun sebelumnya dan diikuti oleh peningkatan drastis dalam ekspor dan *foreign direct investment* Jepang di India (Horimoto, 2015). Meski kemudian mengalami fluktuasi, hubungan bilateral antara kedua negara cenderung menjadi lebih kooperatif dengan kerjasama dalam bidang yang semakin beragam. Peningkatan tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah gambaran terhadap berkembangnya perhatian dan kebutuhan bersama antara kedua negara. Hal ini setidaknya tercermin dalam persepsi Kementerian Luar Negeri Jepang terhadap India:

“India is the world’s largest democracy, boasting a population of 1.2 billion and shares universal values such as freedom of speech and the rule of law. In economic terms too, India has the third largest GDP in Asia and has sustained a high level of economic growth, possessing considerable potential in terms of greater economic exchange with Japan. Further, the coast of India runs right along a sea lance to the Middle East, making India an important presence in terms of Japan’s energy security. As it grows into a major power, India has also become critical in efforts to address climate change, nuclear disarmament, the

world economy and other global issues (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2012).”

Dalam kunjungan Perdana Menteri Shinzo Abe berkunjung ke New Delhi pada 11-13 Desember 2015, kedua negara tidak hanya meningkatkan kerjasama bilateral melalui *Special Strategic and Global Partnership* namun juga membawa negosiasi Kerjasama Dalam Penggunaan Energi Nuklir Secara Damai (*Cooperation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy*) yang telah berlangsung selama beberapa tahun ke level berikutnya (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2015a). Kedua negara akhirnya mencapai kesepakatan dasar yang diwujudkan dalam penandatanganan nota kesepahaman di bulan Desember tersebut. Meski demikian, perjanjian kerjasama ini baru akan ditandatangani setelah kedua negara menemukan titik temu dalam perbedaan teknis (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2015b).

Kemajuan dalam upaya merealisasikan kerjasama tersebut merupakan hasil dari perjalanan panjang bagi Jepang dan India. Kedua negara telah berbagi komitmen untuk bekerjasama dalam penggunaan energi nuklir secara damai sejak tahun 2006, tepatnya saat Perdana Menteri Manmohan Singh berkunjung ke Jepang (Khan, 2014). Dalam kunjungan tersebut, kedua Perdana Menteri menyampaikan pandangannya bahwa energi nuklir memiliki potensi untuk memainkan peranan penting sebagai sumber energi yang aman, *sustainable*, dan *non-polluting* di tengah permintaan dunia yang meningkat terhadap energi dengan catatan melalui pendekatan konstruktif dibawah pengamanan Badan Energi Atom Internasional/IAEA (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2006). Berangkat dari kesamaan pandangan tersebut, empat tahun kemudian Jepang dan India menyambut dimulainya negosiasi mengenai kerjasama dalam penggunaan energi nuklir secara damai (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2010).

Pada tahun 2011, negosiasi antara kedua negara mengalami hambatan dengan terjadinya sebuah bencana nuklir di Jepang. Bencana di bulan Maret tersebut dengan cepat mencuri perhatian internasional, tidak terkecuali India sebagai calon negara penerima teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir

(PLTN) yang dikembangkan oleh Jepang, dan menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak terhadap standarisasi pengamanan yang dilakukan oleh Jepang dalam industri PLTN (Taneja, 2013). Reaksi ini tidak mengherankan mengingat Jepang merupakan salah satu negara yang dianggap sebagai model dalam mengembangkan energi nuklir dan mengamankan sumber daya listrik secara efektif untuk perokonomian yang besar. Meski demikian, bencana tersebut tidak mempengaruhi India untuk tetap bekerjasama dengan Jepang. Hal ini tercermin pada keputusan kedua negara di tahun 2013 untuk melanjutkan negosiasi yang sempat dihentikan oleh Perdana Menteri Naoto Kan pada tahun yang sama dengan terjadinya bencana nuklir tersebut (Toki, 2014).

Selang waktu yang dibutuhkan dari berbagi komitmen bersama hingga penandatanganan nota kesepahaman menunjukkan bahwa kerjasama dalam penggunaan energi nuklir dengan India bukan hal yang mudah untuk diwujudkan bagi Jepang. Hal ini senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Jepang, Katsuya Okada, dalam kunjungannya ke India pada tahun 2010, *“The decision to launch the negotiation for the nuclear cooperation agreement was probably one of the toughest decisions that I had to make as Foreign Minister”* (Khan, 2014). Selama berlangsungnya tahap negosiasi, Jepang menunjukkan kehati-hatian dengan meminta untuk dimasukkannya klausul pembatalan yang menyatakan bahwa Jepang akan mengakhiri kerjasama dalam penggunaan energi nuklir secara damai dengan India apabila India melakukan uji coba nuklir atau bentuk penyalahgunaan lainnya dengan menggunakan teknologi nuklir yang diekspor oleh Jepang selain untuk tujuan yang damai (Khan, 2016). Permintaan Jepang tersebut menunjukkan bahwa kerjasama nuklir yang telah ditandatangani oleh India dengan sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Rusia, Perancis, Mongolia, Namibia, Kanada, Australia, dan beberapa negara lain belum cukup meyakinkan Jepang untuk sepenuhnya percaya bahwa India akan menggunakan energi nuklir dengan tujuan yang damai (Khan, 2016). Sikap Jepang yang menunjukkan keragauan tersebut tidak mengherankan apabila

mengingat negara tersebut pernah menjadi korban serangan bom atom pada masa Perang Dunia II. Pengalaman di masa lalu tersebut menyebabkan nuklir menjadi isu yang sensitif bagi Jepang. Hal ini tercermin salah satunya dalam hubungan bilateral antara Jepang dan India. Tepatnya pada Mei 1998, India melakukan uji coba nuklir untuk kedua kalinya setelah yang pertama di tahun 1974 (Horimoto, 2015). Uji coba tersebut hanya berselang dua tahun setelah penolakan India untuk menandatangani Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir/CTBT (Horimoto, 2015). Serangkaian tindakan yang diambil India tersebut memicu kegeraman masyarakat Jepang yang kemudian mendesak pemerintahan Ryutaro Hasimoto untuk mengambil tindakan tegas (Tuke, 2013). Akibatnya, US\$30 Juta hibah dan US\$1.2 Miliar pinjaman yang awal-mulanya untuk pembangunan India dibatalkan (Horowitz dan Narang, 2014).

Meski ketegangan diantara kedua negara berhasil dicairkan berkat kunjungan Perdana Menteri Yoshiro Mori ke India pada tahun 2000, sensitivitas terhadap nuklir masih tetap hadir dalam masyarakat Jepang. Sensitivitas tersebut salah satunya hadir dalam bentuk kelompok anti-nuklir yang merupakan sebuah bagian dalam konstituensi Jepang dimana salah satu tuntutan nya ialah menentang perdagangan teknologi nuklir. Kelompok tersebut tidak hanya terdiri dari masyarakat sipil, akademisi, dan media, namun juga aparat pemerintah seperti walikota Hiroshima dan Nagasaki (Khan, 2016). Berdasarkan alur pemikirannya, kelompok tersebut terbagi menjadi dua, yakni; a) yang menentang perdagangan teknologi nuklir dengan negara non-Traktat Non-proliferasi Nuklir (NPT), dan b) yang menentang perdagangan teknologi nuklir secara menyeluruh karena memandang penjualan teknologi nuklir sama saja dengan menciptakan “Fukushima Daiichi” yang baru ke negara pembeli (Khan, 2016). Kehadiran kelompok ini dapat disaksikan salah satunya dalam pemandangan di depan kantor Perdana Menteri di Tokyo pada 12 Desember 2015 dimana sejumlah penduduk menyampaikan protesnya terhadap penandatanganan nota kesepahaman mengenai kerjasama dalam penggunaan

energi nuklir secara damai antara Jepang dan India di hari tersebut (The Japan Times, 2015).

Adanya pengalaman pahit dengan senjata nuklir menjadikan Jepang sebagai negara yang menentang proliferasi senjata nuklir. Hal ini tercermin dari *Three Non-nuclear Principles* yang dikemukakan oleh Perdana Menteri Eisaku Sato pada tahun 1967 serta keanggotaannya dalam sejumlah rezim non-proliferasi nuklir di panggung internasional (Tomohiko, 2009). Akan tetapi berbeda halnya dengan energi nuklir, kebutuhan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi agar dapat bangkit dari keterpurukan yang diakibatkan pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki mendesak Jepang untuk memanfaatkannya sebagai sumber energi (Nelson, 2011). Kebutuhan yang mendesak tersebut semakin didukung oleh kondisi Jepang yang miskin akan sumber energi sehingga meninggalkan nuklir sebagai alternatif serta krisis minyak dunia yang terjadi pada tahun 1970-an (Permana, 2012). Disamping itu, tidak seluruh masyarakat Jepang menolak kehadiran energi nuklir meski terdapat sisa-sisa *nuclear allergy* yang ditinggalkan oleh peristiwa di akhir Perang Dunia II. Sebagian diantaranya justru termasuk dalam sebuah kelompok yang mendukung dan mempromosikan energi nuklir di Jepang. Kelompok yang biasa dikenal dengan istilah *Nuclear Village* tersebut terdiri dari pendukung berupa kelembagaan maupun perseorangan dalam industri nuklir, birokrat, diet, federasi bisnis, media, hingga akademisi (Kingston, 2012). Tidak jarang pengertian terhadap kelompok ini bertumpang tindih dengan *Iron Triangle*; sebuah hubungan simbiosis-mutualisme antara kelompok penekan, birokrat, dan politisi/anggota diet (Kingston, 2012).

Sebagai negara yang dapat dikatakan berhasil dalam mengembangkan energi nuklir, tidak menutup kemungkinan bahwa Jepang memiliki kemampuan untuk mengembangkan senjata nuklir. Meski demikian, Jepang membatasi penelitian, pengembangan, dan penggunaan energi nuklirnya pada tujuan yang damai sebagaimana yang tercantum dalam *Atomic Energy Basic Act 1955* (Japanese Ministry of Justice, 2010). Hal tersebut tercermin melalui keputusannya untuk tidak melakukan kerjasama dalam penggunaan energi

nuklir dengan negara-negara di luar rezim NPT hingga akhirnya India menjadi yang pertama setelah sekian tahun proses negosiasi (*The risky nuclear deal with India*, 2015). Oleh sebab itu, keputusan Jepang untuk bekerjasama dalam penggunaan energi nuklir secara damai dengan India menjadi hal yang menarik untuk diteliti sebab ia menunjukkan perubahan dalam sikap politik Jepang, khususnya terhadap energi nuklir. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menuangkan ketertarikannya dalam analisis lebih lanjut berbentuk karya tulis ilmiah dengan judul

“Keputusan Jepang Untuk Melakukan Kerjasama Dalam Penggunaan Energi Nuklir Secara Damai Dengan India”

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam penulisan karya tulis ilmiah, batasan atau ruang lingkup dibutuhkan agar penulis dapat fokus pada objek penelitian dan mempertegas apa yang ingin disampaikan melalui penelitiannya sehingga pembahasan dalam karya tulis menjadi tepat sasaran dan tidak keluar dari pokok permasalahan (Hadi, 2004, hal. 8). Ruang lingkup juga membantu pembaca agar dapat tercegah dari kerancuan pengertian maupun dari kekaburan wilayah pembahasan (Hadi, 2004, hal. 8). Oleh sebab itu, dalam karya tulis ilmiah ini penulis memberi ruang lingkup pembahasan yang dibagi dalam batasan materi dan batasan waktu.

1.2.1 Batasan Materi

Dalam karya tulis ilmiah ini, penulis membatasi materi pembahasan pada faktor-faktor yang mempengaruhi Jepang untuk melakukan kerjasama dalam penggunaan energi nuklir secara damai dengan India.

1.2.2 Batasan Waktu

Dalam karya tulis ilmiah ini, penulis membatasi waktu dalam pembahasan dengan tahun 2000 sebagai batasan awal dan 2015 sebagai

batasan akhir. Tahun 2000 dipilih menjadi batasan awal karena suatu keputusan pada umumnya dipengaruhi oleh hal-hal yang terjadi pada masa sebelum diambilnya keputusan, sementara Jepang dan India mulai berbagi komitmen untuk bekerjasama dalam penggunaan energi nuklir pada tahun 2006. Disamping itu, tahun 2000 menjadi sebuah momentum bagi Jepang dan India sebab hubungan keduanya kembali mencair setelah terjadi ketegangan akibat uji coba nuklir yang dilakukan oleh India pada tahun 1998. Sedangkan untuk batasan akhir, tahun 2015 dipilih karena pada tahun tersebut kedua negara mencapai kesepakatan dalam kerjasama tersebut dengan menandatangani nota kesepahaman. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan apabila penulis menggunakan data diluar batasan waktu yang telah ditentukan selama data tersebut dapat menunjang penulisan karya tulis ilmiah ini.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang dirumuskan oleh penulis ialah sebagai berikut:

“Mengapa Jepang memutuskan untuk melakukan kerjasama dalam penggunaan energi nuklir dengan India?”

1.4 Tujuan Penelitian

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Jepang untuk melakukan kerjasama dalam penggunaan energi nuklir secara damai dengan India.

1.5 Landasan Teori

Dalam penulisan karya tulis ilmiah, seorang peneliti membutuhkan landasan pemikiran untuk menganalisa dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Oleh sebab itu, peneliti umumnya menggunakan konsep, teori,

maupun bentuk landasan pemikiran lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam penelitian. Adapun teori menurut Mohtar Mas'ood adalah:

“...suatu bentuk pertanyaan yang menjawab pertanyaan “mengapa”; artinya, berteori adalah upaya memberi makna pada fenomena yang terjadi. Pernyataan yang disebut teori itu berwujud sekumpulan generalisasi dan karena di dalam generalisasi itu terdapat konsep-konsep, bias juga diartikan bahwa teori adalah pernyataan yang menghubungkan konsep-konsep secara logis.” (Mas'ood, 1994, hal. 186)

Sedangkan dalam karya tulis ilmiah ini, penulis menggunakan *Decision Making Approach* yang dikemukakan oleh Richard C. Snyder, H.W. Bruck, dan Burton Sapin. Penggunaan teori tersebut didasarkan penilaian bahwa pemikiran Snyder dan kawan-kawannya yang menekankan pada analisis proses dalam menganalisis aksi negara dapat memudahkan penulis untuk lebih memahami keputusan Jepang yang diambil melalui proses panjang dengan pola aksi-reaksi-interaksi yang asimetris. Selain itu, buah pemikiran ketiganya mengenai pengaruh *external setting* dan *internal setting* terhadap pengambilan keputusan dinilai dapat membantu penulis dalam menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan Jepang tersebut.

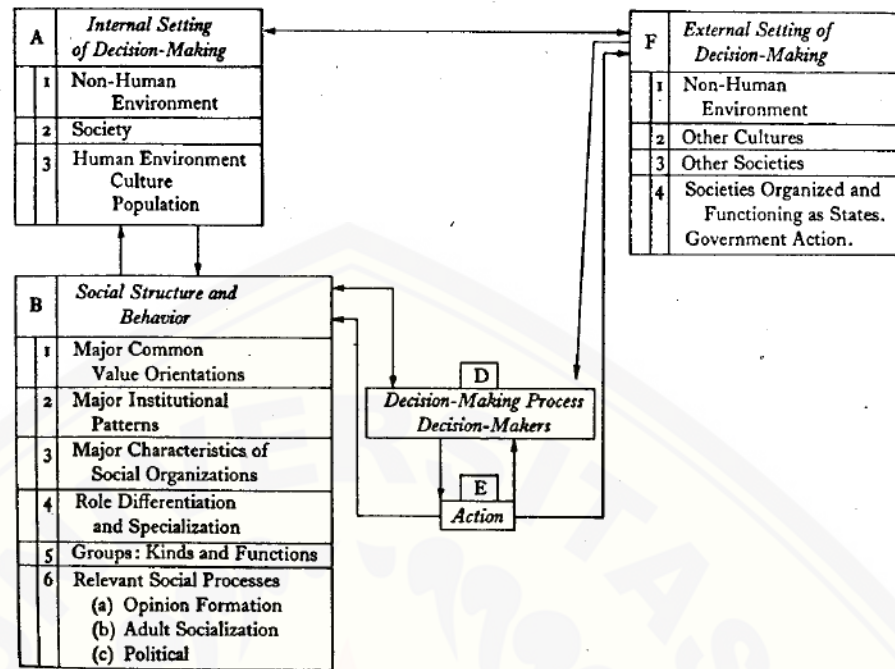
1.5.1 *Decision-Making Approach*

Sejak awal berkembangnya hubungan internasional sebagai sebuah ilmu pengetahuan, negara telah menjadi aktor utama di dalamnya sehingga interaksi antar negara sudah sewajarnya menjadi salah satu perhatian utama para penimba ilmu tersebut. Layaknya hubungan sesama manusia, dalam hubungan antar negara juga terdapat aksi dan reaksi. Berdasarkan *decision-making approach*, aksi yang dilakukan oleh suatu negara dikarenakan adanya kebutuhan untuk membangun, memelihara, dan mengatur hubungan dengan negara lain agar dapat berjalan sesuai dengan kepentingan nasional (Rosenau, 1969, hal. 199). Dalam kata lain, suatu aksi merupakan sebuah upaya negara untuk menekan kegagalan atau perihal lainnya yang tidak diinginkan sehingga dapat memperbesar kemungkinan untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan (Rosenau, 1969, hal. 199). Oleh sebab itu, Snyder, Bruck, dan Sapin menyebutnya sebagai sebuah tindakan yang *planful* (Rosenau, 1969, hal. 199). Akan tetapi, rangkaian aksi dan reaksi tidak selalu sesuai dengan ekspektasi atau berwujud simetris. Ada kalanya aksi mendapatkan reaksi yang lamban, tidak sesuai/tidak memiliki korelasi dengan tujuan dari negara yang menginisiasikan aksi, dan bahkan tidak memperoleh reaksi sama sekali. Meski demikian, terdapat karakter dari pola yang umumnya dapat ditemukan dalam interaksi antar negara, baik berupa pengulangan aksi dan reaksi, tujuan yang tetap/tidak berubah, macam aksi yang khas, reaksi yang sama, atau hubungan antar negara terkait yang menjadi teratur.

Adapun yang disebut dengan aksi maupun reaksi negara yakni tindakan yang dilakukan oleh mereka yang bertindak atas nama negara (Rosenau, 1969, hal. 201). “Mereka” dalam hal ini merujuk pada para pemangku kekuasaan yang secara *de jure* memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Tindakan yang diambil oleh para pemangku kekuasaan tersebut merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan oleh unit-unit politik baik individu, kelompok, atau koalisi yang diakui dalam negara (Llyod, 1982, hal. 7). Dalam proses tersebut, para pengambil keputusan umumnya melalui serangkaian kegiatan yang dapat mencakup identifikasi masalah, penyusunan berbagai fakta dan informasi, penetapan pilihan, dan pelaksanaan pilihan yang telah ditetapkan berdasarkan pertimbangan tertentu (Mintz dan DeRouen Jr., 2010, hal. 4). Meski demikian, perlu ditekankan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan para pengambil keputusan. Oleh sebab itu, diperlukan pemahaman dari sudut pandang para pembuat keputusan untuk dapat memahami tindakan suatu negara (Varma, 2010, hal. 392).

Pada dasarnya, para pembuat keputusan bertindak atas situasi, kondisi, serta faktor yang berada dalam *internal* dan *external setting* (Rosenau, 1969, hal. 203). Keduanya saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain sebagaimana yang tergambar dalam skema berikut:



Gambar 1.1 Keterkaitan antara *internal setting* dan *external setting* dalam pengambilan keputusan.

Sumber: Richard C. Snyder, H.W. Bruck, & Burton Sapin. 1962. *Foreign Policy Decision-Making: An Approach to the Study of International Politics*. Halaman 201

Berdasarkan diagram dalam gambar 1.1, pengambilan keputusan merupakan sebuah proses yang terdiri dari faktor tertentu di dalam dan dari luar *setting* yang saling mempengaruhi dan telah diseleksi berdasarkan penafsiran para pengambil keputusan. Istilah *setting* dalam hal ini merujuk pada seperangkat kategori yang terkait dengan berbagai kondisi dan faktor yang berpotensi untuk memberikan pengaruh terhadap tindakan negara (Rosenau, 1969, hal. 203). Snyder dan kawan-kawan membaginya ke dalam dua macam yakni *external setting* dan *internal setting*. Sederhananya, *external setting* merupakan segala faktor dan kondisi yang terjadi diluar batas wilayah negara. Ia dapat selalu berubah sesuai dengan apa yang dinilai signifikan oleh para pembuat keputusan (Rosenau, 1969, hal. 203). Sedangkan yang dimaksud dengan *internal setting* ialah segala faktor dan kondisi, termasuk perilaku dan struktur sosial, yang berada di dalam negara dimana aktor pembuat keputusan berkuasa.

Berdasarkan buah pemikiran Snyder dan kawan-kawannya, *external setting* terbagi ke dalam beberapa faktor yang terdiri atas lingkungan non-manusia, budaya, masyarakat, masyarakat yang terorganisir dan berfungsi sebagai negara, dan tindakan pemerintah, sedangkan dalam *internal setting* terdapat faktor lingkungan non-manusia, masyarakat, dan lingkungan manusia yang terdiri atas budaya dan populasi. Selain ketiga faktor yang telah disebutkan, perilaku dan struktur sosial termasuk kondisi dalam *internal setting* yang tidak dapat diacuhkan. Meski demikian, Snyder dan kawan-kawan memisahkannya menjadi suatu kondisi tersendiri dan membaginya ke dalam beberapa faktor yang terdiri atas orientasi-orientasi nilai utama, pola kelembagaan utama, karakter utama organisasi-organisasi sosial, diferensiasi dan spesialisasi peran (dalam struktur sosial), jenis-jenis dan fungsi kelompok, dan proses-proses sosial yang relevan. Dari sekian banyak faktor yang telah disebutkan, tidak seluruhnya selalu memiliki relevansi terhadap aksi negara. Ia dapat menjadi relevan apabila para pengambil keputusan menilai demikian.

Mengacu penjelasan yang telah disampaikan, penulis perlu melihat dari sudut pandang Jepang sebagai pihak pengambil keputusan untuk dapat memecahkan masalah yang telah dirumuskan. Guna melihat sudut pandang tersebut, penulis tidak dapat melepaskan perhatian terhadap proses yang dilalui oleh kedua negara dalam mencapai kerjasama, khususnya sejak Jepang dan India berbagi komitmen bersama di tahun 2006 hingga akhirnya mencapai kesepakatan melalui penandatanganan nota kesepahaman di tahun 2015. Melalui pemahaman terhadap rangkaian aksi dan reaksi yang dilalui oleh kedua negara, penulis dapat menemukan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan menganalisis lebih jauh mengenai kepentingan masing-masing. Selain itu, penulis dapat mengetahui berbagai kondisi dan faktor yang memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi dan membentuk keputusan Jepang baik dari

internal setting maupun *external setting* selama proses pengambilan keputusan.

Sejauh data yang ditemukan oleh penulis, faktor dalam *internal setting* yang memiliki keterkaitan terhadap keputusan Jepang berada pada *Social Structure and Behavior*. Faktor yang dimaksud yakni *Major Institutional Patterns* berupa hubungan kolusif antara kelompok penekan, birokrat, dan politisi, atau yang umumnya dikenal dengan istilah *Iron Triangle*/Segitiga Besi. Dalam hal ini, hubungan saling menguntungkan tersebut berlangsung antara perusahaan nuklir Jepang, partai yang berkuasa, serta Perdana Menteri. Sementara pada *external setting*, faktor yang relevan terhadap keputusan Jepang berasal dari *non-human environment*. Lingkungan non-manusia tersebut berupa komitmen India untuk meningkatkan penggunaan energi nuklir sebagai salah satu solusi terhadap peningkatan dalam permintaan energi yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut menjadi peluang pasar yang menggiurkan bagi Jepang sebagai salah satu negara yang unggul dalam menghasilkan teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Potensi tersebut semakin terbuka dengan tercapainya kerjasama nuklir India-Amerika Serikat pada tahun 2006 yang membuat India memperoleh pengecualian dari Nuclear Supplier Group (NSG) sehingga dapat melakukan aktivitas perdagangan teknologi meski tidak menandatangani Traktat Non-proliferasi Nuklir (NPT).

Seluruh faktor yang telah disebutkan, baik dari *internal setting* maupun *external setting*, saling berkaitan dan memberikan pengaruh terhadap satu sama lain dalam proses pengambilan keputusan. Peningkatan dalam permintaan energi membuat India bergiat untuk memperbesar peranan tenaga nuklir sebagai salah satu solusinya. Hal ini menjadi sebuah peluang yang menggiurkan bagi Jepang, khususnya pihak tertentu yang berada dibalik industri nuklir. Melalui pola kelembagaan utama yang telah mengakar dalam politik Jepang, pihak-

pihak berkepentingan tersebut kemudian melobi para pengambil keputusan agar meloloskan kerjasama dalam penggunaan energi nuklir secara damai dengan India. Hasilnya, para pembuat keputusan mengidentifikasi bahwa terdapat potensi pasar di India dan menilai bahwa kerjasama dalam penggunaan energi nuklir dengan negara tersebut akan lebih menguntungkan sehingga memutuskan untuk mengabaikan penentangan terhadap ekspor teknologi nuklir yang disuarakan oleh sebagian masyarakat.

1.6 Argumen Utama

Berdasarkan latar belakang beserta teori yang telah diuraikan, penulis berargumen bahwa keputusan Jepang untuk melakukan kerjasama dalam penggunaan energi nuklir secara damai dengan India dikarenakan faktor dalam *internal setting* dan *external setting*. Faktor yang dimaksud dalam *internal setting* merujuk pada hubungan saling menguntungkan antara kelompok penekan, birokrat, dan politisi dalam industri nuklir Jepang, sedangkan faktor yang dimaksud dalam *external setting* mengacu pada komitmen India untuk meningkatkan penggunaan energi nuklir dalam negerinya.

1.7 Metode Penelitian

Dalam penulisan karya tulis ilmiah, metode penelitian dibutuhkan guna mengungkap hubungan antara data yang telah dikumpulkan dengan landasan teori yang digunakan sehingga penulis dapat menguji argumen utama dan lebih jauhnya menghasilkan karya tulis ilmiah yang sesuai dengan kaidah keilmuan; rasional, empiris, dan sistematis. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dan teknik analisis data sebagai berikut:

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis menggunakan data sekunder karena keterbatasan untuk mendapatkan data dari sumber

secara langsung. Data-data tersebut dikumpulkan oleh penulis menggunakan metode telaah pustaka (*library research*) yang diperoleh dari sarana-sarana berikut:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
2. Ruang Baca Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
3. Situs internet
4. Media massa
5. Koleksi pribadi

1.7.2 Teknik Analisis Data

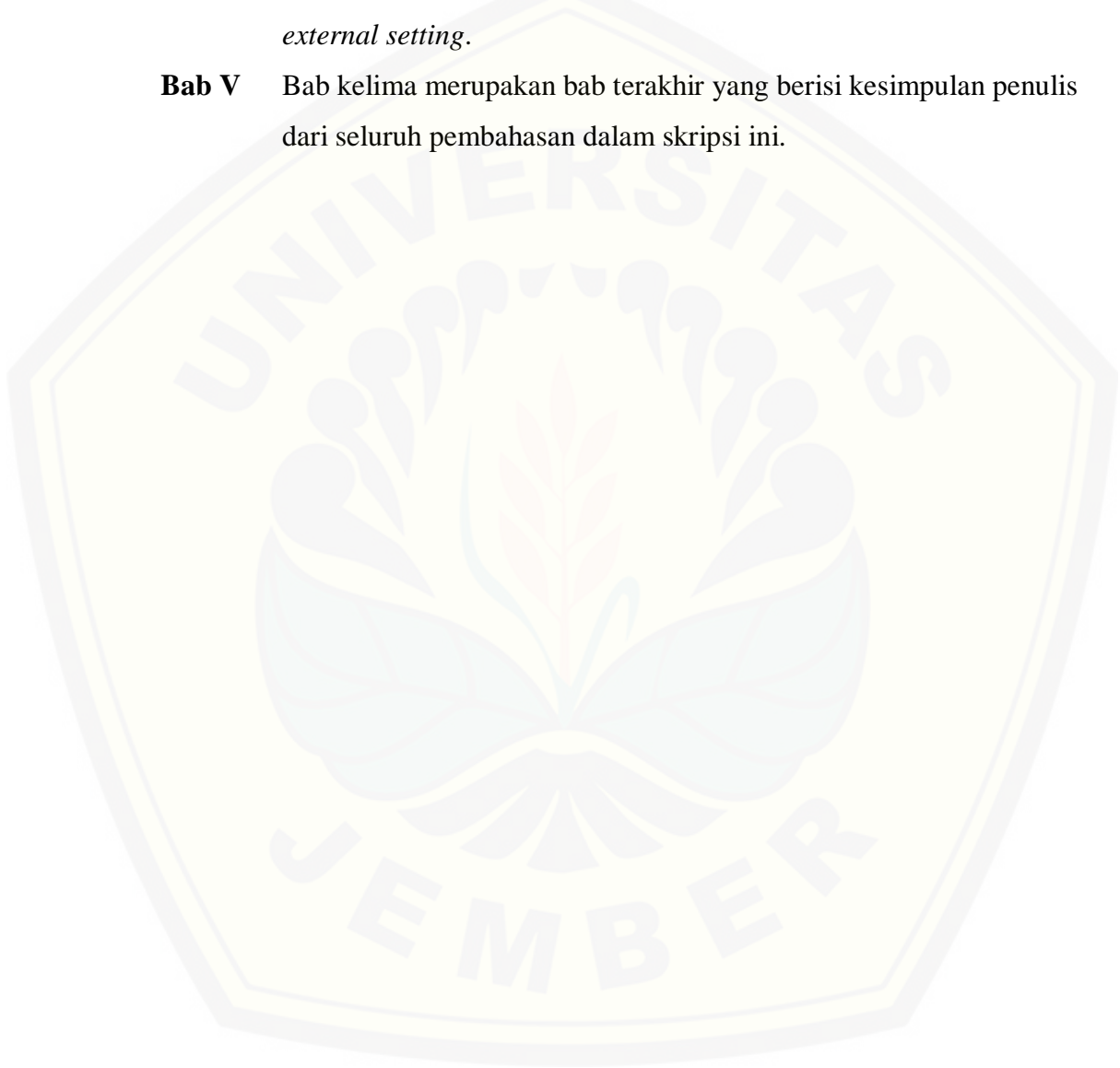
Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Menurut Mohtar Mas'ood dalam *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, kegiatan deskriptif dalam melakukan studi dan penelitian ilmu hubungan internasional berupa pengumpulan fakta-fakta spesifik yang dapat dibuktikan kebenarannya. Fakta-fakta tersebut kemudian dirangkai menjadi pola-pola yang mempunyai arti hingga terbentuk generalisasi.

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis akan menyusun hasil penelitian ke dalam beberapa bab yang saling berkaitan sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami. Beberapa bab yang dimaksud antara lain:

- Bab I** Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, argumen utama, metode penelitian, dan sistematika penulisan
- Bab II** Dalam bab ini penulis menggambarkan sikap politik Jepang terhadap nuklir dengan membaginya dalam tiga sub-bab yakni kebijakan nuklir Jepang, segitiga besi Jepang, dan para pengambil keputusan.

- Bab III** Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang kebangkitan India sebagai aktor global.
- Bab IV** Dalam bab ini penulis membahas faktor di balik keputusan Jepang sebagai jawaban dari masalah yang telah dirumuskan. Penulis membaginya dalam dua sub-bab yang terdiri atas *internal setting* dan *external setting*.
- Bab V** Bab kelima merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan penulis dari seluruh pembahasan dalam skripsi ini.



BAB II

SIKAP POLITIK JEPANG TERHADAP NUKLIR

Dalam keputusan Jepang untuk melakukan Kerjasama Dalam Penggunaan Energi Nuklir Secara Damai dengan India, Jepang bertindak sebagai pengambil keputusan sehingga perlu untuk dapat memahami masalah penelitian dari sudut pandang Jepang. Oleh sebab itu, bab ini ditujukan untuk menggambarkan sikap politik (*political stance*) Jepang terhadap nuklir dengan menjelaskan tentang kebijakan nuklir Jepang, segitiga besi Jepang, dan sosok para pengambil keputusan.

2.1 Kebijakan Nuklir Jepang

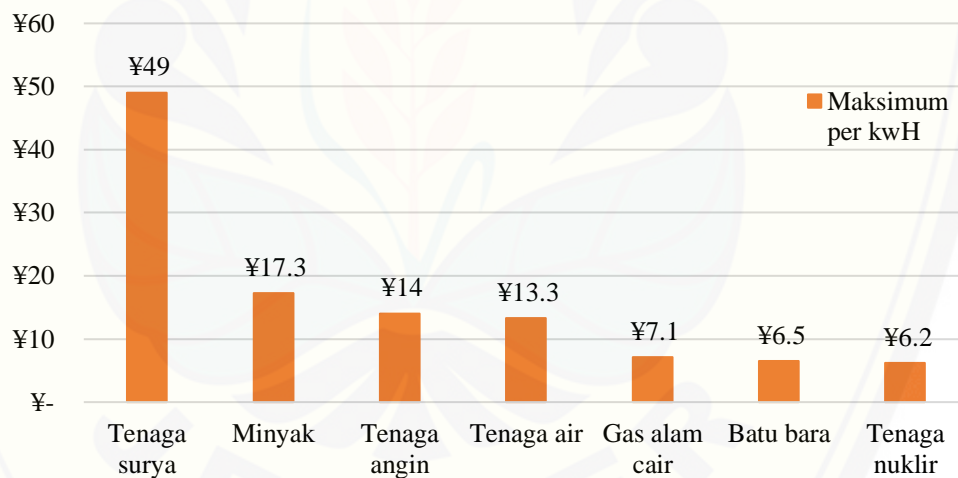
Sebagai sebuah negara yang memiliki pengalaman pahit dengan nuklir, Jepang kini justru sulit untuk melepaskan diri dari nuklir.¹ Hal ini bukan tanpa alasan, sebab Jepang tidak hanya merupakan salah satu negara dengan sumber daya energi yang langka melainkan juga negara dengan struktur pasokan energi yang rentan (*The Federation of Electric Power Companies of Japan*, tanpa tanggal). Ia bahkan terhitung sebagai negara yang paling rentan dalam pasokan energi diantara negara-negara anggota Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) (McCann, 2013). Kondisi tersebut tidak meninggalkan pilihan baginya selain memasok sumber daya energi dari luar negeri. Pada tahun 2013, tercatat sekitar 80% kebutuhan energinya dipenuhi dari hasil impor (*The Federation of Electric Power Companies of Japan*, tanpa tanggal). Sebagian besar dari hasil impor tersebut merupakan minyak bumi dimana 90% berasal dari kawasan yang cenderung tidak stabil secara politik yakni Timur Tengah (*The Federation of Electric Power Companies of Japan*, tanpa tanggal). Kondisi tersebut menempatkan Jepang pada urutan ketiga setelah Amerika Serikat dan Cina

¹ Jepang mendapat serangkaian serangan bom atom pada 6 Agustus 1945 di Hiroshima dan 9 Agustus 1945 di Nagasaki oleh Angkatan Udara Amerika Serikat yang merenggut banyak korban jiwa dan mengakibatkan berbagai kerugian besar lainnya.

sebagai negara pengimpor minyak bumi terbesar di dunia (Central Intelligence Agency, 2014).

Sejak tahun 1950-an, minyak bumi mulai beralih menjadi sumber energi utama Jepang sebab batu bara dan air di dalam negeri tidak cukup lagi memenuhi permintaan (McCann, 2013). Ketergantungan Jepang terhadap minyak kemudian mendapat *wake-up call* saat krisis melanda akibat embargo minyak dari negara-negara arab di tahun 1973.² Melambungannya harga bahan bakar yang selama bertahun-tahun menjadi penopang pertumbuhan ekonomi tersebut mendorong Jepang untuk melakukan diversifikasi energi salah satunya dengan meningkatkan penggunaan energi nuklir (The Federation of Electric Power Companies of Japan, tanpa tanggal). Alasan dibalik pilihan tersebut tidak lain ialah efisiensi biaya (Khan, 2012).

Tabel 2.1 Biaya untuk menghasilkan listrik



Sumber: Ministry of Economy, Trade, and Industry (METI) dalam Shamshad Khan. 2012. *Japan's Nuclear Energy Debate: A year after the Fukushima nuclear crisis*. Diakses dari http://www.idsa.in/issuebrief/JapansNuclearEnergyDebate_Shamshad pada 16/10/2017

Dapat dilihat dalam tabel 2.1 bahwa nuklir mampu menghasilkan energi per jamnya dengan biaya yang paling rendah dibandingkan sumber energi lain yang umumnya digunakan. Hal ini jelas menguntungkan bagi negara dengan

² Sesuatu yang menimbulkan kewaspadaan terhadap situasi yang tidak menyenangkan atau tidak diharapkan dan memicu dorongan untuk mengambil tindakan.

konsumsi energi yang tinggi seperti Jepang, terlebih dengan kondisi ekonomi yang menggolongkannya sebagai *new industrialized country* pada masa ditetapkannya kebijakan tersebut. Meski memakan waktu puluhan tahun, upaya tersebut mampu menurunkan ketergantungan Jepang terhadap minyak dari 77% pada tahun 1973 menjadi 42% pada tahun 2009 (Khan, 2012). Peran nuklir bagi kemandirian energi Jepang semakin diperkuat ketika *International Atomic Energy Agency* (IAEA) melaporkan bahwa penemuan ladang minyak yang baru terus mengalami penurunan. Selain efisiensi biaya, alasan yang turut dikemukakan oleh pemerintah Jepang terhadap penggunaan energi nuklir ialah rendahnya emisi karbon dioksida (CO₂) yang dihasilkan. Hal ini memenuhi salah satu pilar Jepang dalam kebijakan energi yang terdiri atas *energy security*, *environment protection*, dan *economic efficiency* (Japanese Ministry of Economy, Trade, and Industry, 2006).

Sebelum krisis minyak dunia terjadi pada tahun 1970-an, energi nuklir telah memiliki peranan penting bagi Jepang. Peranan tersebut disuarakan dalam slogan program pengembangan energi nuklir di tahun 1954 yang berbunyi “*nuclear power is the only way for Japan to rise from the ashes*” (Khan, 2012). Berawal dari program tersebut, pemerintah Jepang bersama dengan *keidanren* menyusun rencana akan masa depan nuklir sebagai sumber daya alternatif dalam upaya menekan ketergantungan Jepang terhadap impor minyak (Murphy, 2014).³ Guna mewujudkan rencana tersebut, Kementerian Industri dan Perdagangan Jepang (MITI), yang kemudian berubah menjadi Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI), mengerahkan subsidi dan bentuk sumber daya lainnya yang dimiliki oleh negara untuk mengirimkan “sinyal” bahwa terdapat peluang lahan bisnis dalam energi nuklir yang menjadi prioritas nasional Jepang. Upaya tersebut dimaksudkan untuk menarik penanam modal dan pemberi pinjaman, serta mendorong perusahaan untuk memasuki industri nuklir Jepang melalui ikatan dengan vendor luar negeri seperti Toshiba dengan Westinghouse, Hitachi

³ Federasi Organisasi Ekonomi Jepang

dengan GE, dan yang lebih baru lagi, Mitsubishi dengan Areva (Kingston, 2012). Tidak berhenti sampai disana, Jepang terus mengembangkan diri dengan membentuk perangkat-perangkat nasional seperti *The Atomic Energy Commission* (AEC), *Nuclear Safety Commission* (NSC), *Japan Atomic Energy Research Institute* (JAERI) dan lembaga-lembaga penunjang lainnya, lalu mengimpor *prototype* reaktor nuklir dari Inggris, membeli desain reaktor nuklir dari Amerika Serikat yang kemudian dibangun dalam kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lokal seperti Hitachi, Toshiba dan Mitsubishi Heavy Industry, hingga akhirnya berhasil membangun pembangkit listrik tenaga nuklirnya sendiri di tahun 1970-an (World Nuclear Association, 2016). Kini, tepatnya sebelum bencana nuklir Fukushima Daiichi terjadi, Jepang telah memiliki 54 reaktor nuklir yang beroperasi di 17 tempat dengan total kapasitas pembangkit sekitar 46 GW (Center for Strategic & International Studies, 2014). Ia juga menjadi salah satu produsen tingkat atas dalam teknologi nuklir, yang mana produknya telah digunakan oleh banyak negara. Sampai dengan akhir tahun 2016, Jepang telah menandatangani perjanjian kerjasama nuklir dengan Kanada, Australia, Tiongkok, Amerika Serikat, Perancis, Inggris, *The European Atomic Energy Community* (EURATOM), Kazakhstan, Korea Selatan, Vietnam, Yordania, Rusia, Turki, dan Uni Emirat Arab (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2017a).

Melihat perkembangan ekonomi yang telah dicapai serta keunggulan teknologi yang berhasil dikembangkannya, Jepang dinilai memiliki potensi untuk memproduksi senjata nuklir. Penilaian tersebut salah satunya disuarakan oleh Perdana Menteri Tsutomu Hata pada tahun 1994, “*It’s certainly the case that Japan has the capability to possess nuclear weapons but has not made them* (Chanlett-Avery dan Nikitin, 2009).” Meski demikian, jauh sebelum Perdana Menteri Jepang ke-80 tersebut menyampaikan pernyataannya, pemerintah Jepang telah membatasi penelitian, pengembangan, dan penggunaan energi nuklir baik di tingkat domestik maupun internasional hanya pada tujuan yang damai melalui *Atomic Energy Basic Act* 1955 (Japanese Ministry of Justice, 2010). Dalam Undang-Undang

tersebut tidak dijelaskan secara terperinci makna dari kata “damai” itu sendiri, namun disebutkan bahwa penelitian, pengembangan dan penggunaan energi nuklir diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan manusia dan standar hidup nasional. Apabila mengacu pada *International Atomic Energy Agency*, “damai” yang dimaksud dalam penggunaan energi nuklir ialah penggunaan yang tidak mengarah pada proliferasi senjata nuklir dan tidak membahayakan kesehatan maupun keselamatan manusia beserta lingkungannya (ElBaradei, 1999). Selain *Atomic Energy Basic Act 1955*, terdapat *Three Non-Nuclear Principles* yang dikemukakan oleh Perdana Menteri Eisaku Sato dalam sidang parlemen pada 11 Desember 1967 (Akaha, 1984). Prinsip tidak tertulis yang hingga kini diadopsi oleh Jepang tersebut melarang kepemilikan, produksi, dan pihak manapun untuk membawa senjata nuklir ke Jepang (Akaha, 1984).

Tidak berhenti sampai di dalam negeri, identitas Jepang sebagai negara bebas senjata nuklir juga dibentuk melalui keikutsertaan dan keaktifannya dalam rezim non-proliferasi internasional seperti *Non-Proliferation of Nuclear Weapons Treaty* (NPT), dan *Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty* (CTBT) (Tomohiko, 2009). Negara yang dijuluki sebagai *pacifist* tersebut turut mempromosikan perlucutan senjata dan non-proliferasi melalui beragam usaha seperti memperkenalkan resolusi penghapusan senjata nuklir dalam sidang Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), menjadi tuan rumah dari konferensi perlucutan senjata yang diselenggarakan oleh PBB, mendukung zona bebas senjata nuklir di Asia Tengah, dan membantu upaya-upaya denuklirisasi di negara-negara eks-Uni Soviet.⁴ Contoh lainnya tercatat dalam hubungan bilateral antara Jepang dan India di tahun 1998. Uji coba nuklir yang dilakukan oleh India di tahun tersebut tidak hanya memicu Jepang untuk membatalkan *Official Development Assistance*

⁴ Istilah *Pacifist* umumnya menggambarkan para penjunjung perdamaian. Lebih spesifiknya, ia merujuk pada para pemegang prinsip pasifisme yang meyakini bahwa pertikaian dapat diselesaikan dengan damai dan yang menentang perang maupun kekerasan dalam segala bentuk.

(ODA) kepada India, namun juga membuat hubungan bilateral antara kedua negara mencapai titik terendah sejak berakhirnya Perang Dunia (Jain, 2008a).

Demikian pula dalam kerjasama internasional, Jepang cenderung selektif dalam memilih mitranya. Ia dikenal hanya mengekspor teknologi nuklir kepada negara yang menandatangani NPT terkecuali Perancis di tahun 1972 dan Cina di tahun 1982 (Kesavan, 2016). Meski kedua negara tersebut tergolong sebagai negara non-NPT, keduanya diakui oleh NPT sebagai *nuclear powers* karena merupakan dewan keamanan tetap PBB (Al Jazeera, 2016). Oleh sebab itu, kerjasama dalam penggunaan energi nuklir secara damai dengan India menjadi sebuah catatan baru bagi Jepang yang menarik untuk diulas, terlebih apabila mengingat sikap yang ditunjukkannya terhadap tindakan India di tahun 1998.

2.2 Segitiga Besi Jepang

Awal mula kehadiran energi nuklir di Jepang tercatat jauh sebelum krisis minyak terjadi di tahun 1970-an, tepatnya dalam program pengembangan energi nuklir yang dimulai sejak tahun 1954. Terlaksananya program penelitian dengan alokasi dana kurang lebih sebesar ¥230 juta tersebut tidak dapat dilepaskan dari pidato bertajuk “Atoms for Peace” yang disampaikan oleh Dwight D. Eisenhower dalam majelis umum PBB pada Desember 1953. Melalui pidato tersebut, Amerika Serikat mempromosikan energi nuklir dengan mengalihkan penggunaannya dari militer pada penerapan yang lebih membawa manfaat sosial (Kuznick, 2011). Upaya tersebut dilakukan tidak lain agar rencana penyediaan bahan bakar dan teknologi nuklir yang dicanangkannya dapat diterima oleh negara-negara lain. Dengan demikian, akan lebih mudah baginya untuk melakukan deterensi terhadap Uni Soviet yang menguji coba bom hidrogen di bulan Agustus pada tahun yang sama disampaikannya pidato tersebut (Tanaka dan Kuznick, 2011).

Dalam upaya tersebut, Amerika Serikat memandang Jepang selaku negara yang pernah merasakan langsung serangan bom atom dapat membantu

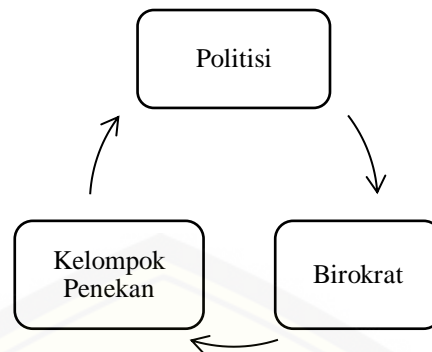
melawan citra negatif terhadap energi nuklir apabila menerapkan gagasan yang dipromosikannya (Kuznick, 2011). Akan tetapi, gagasan tersebut bukan sesuatu yang mudah untuk diterapkan sebab terdapat sebuah kondisi sosial yang dikenal dengan *kaku arerugi* atau *nuclear allergy* dalam masyarakat Jepang. Kondisi tersebut tidak hanya dibentuk oleh pengeboman Hiroshima dan Nagasaki pada penghujung Perang Dunia II, namun juga dipupuk dengan peristiwa *Daigo Fukuryū Maru (Lucky Dragon No. 5)* pada bulan Maret 1954. Peristiwa tersebut dinamakan demikian setelah sebuah kapal penangkap ikan dengan nama yang sama terkena radiasi dari ledakan bom hidrogen yang sedang diuji coba oleh Amerika Serikat di Bikini Atoll; sebuah pulau karang di kepulauan Marshall yang jatuh ke tangan Amerika Serikat setelah dikuasai oleh Jepang (Tanaka dan Kuznick, 2011). Oleh sebab itu, timbul pertanyaan ketika Jepang pada akhirnya melaksanakan program pengembangan energi nuklir di tahun yang sama dengan terjadinya insiden tersebut. Hal ini yang membuat peran seorang Shoriki Matsutaro tidak dapat dilewatkan. Sosok seorang yang dikenal sebagai bapak *baseball* Jepang sekaligus pemilik perusahaan Nippon Television Network tersebut muncul di tengah kecemasan terhadap anti-nuklir yang sedang meningkat pasca insiden *Lucky Dragon No. 5* dan mempromosikan manfaat energi nuklir (Tanaka dan Kuznick, 2011). Dengan dukungan dan bantuan dari Pemerintah Amerika Serikat, tokoh yang menjadi anggota majelis rendah dalam parlemen di tahun 1955 tersebut mengadakan pameran “The Peaceful Uses of Nuclear Energy” di sejumlah kota (Tanaka dan Kuznick, 2011). Beberapa kota diantaranya bahkan secara eksklusif disponsori oleh Yomiuri Shimbun yang tidak lain merupakan perusahaan surat kabar milik Matsutaro (Tanaka dan Kuznick, 2011).

Meski kondisi dalam masyarakat Jepang pada masa itu sedang diwarnai oleh sentimen anti-nuklir, pameran tersebut justru menuai pujian dari berbagai pihak termasuk ketua dari kelompok korban *A-bomb* sekaligus juru kampanye penghapusan senjata nuklir, Moritaki Ichiro, yang memberikan dukungannya secara terbuka terhadap energi nuklir dalam

pertemuan perdana *Nippon Hidankyo* (Tanaka dan Kuznick, 2011).⁵ Hal ini tidak dapat dilepaskan dari bagaimana pameran tersebut dengan sangat berhati-hati menghindari aplikasi militer dan lebih menampilkan rancangan-rancangan aplikasi yang memiliki manfaat sosial layaknya generator listrik, pengobatan kanker, pelestarian makanan, pengendalian serangga, dan aplikasi-aplikasi lainnya yang berpotensi memajukan penelitian ilmiah (Kuznick, 2011). Selain itu, terdapat pula campur tangan dari pihak-pihak berpengaruh lainnya seperti yang dicontohkan oleh dewan kota Hiroshima, pemerintah prefektur Hiroshima, Universitas Hiroshima, dan surat kabar Chugoku yang menjadi co-sponsor dibalik terlaksananya pameran di kota Hiroshima (Kuznick, 2011). Tidak heran apabila konsep penggunaan energi nuklir secara damai pada akhirnya diterima oleh masyarakat Jepang dalam waktu yang tidak lama.

Shoriki Matsutaro dan para politisi lainnya, aktivis, media, hingga akademisi yang menjadi pendukung dibalik upaya pengenalan energi nuklir kepada masyarakat Jepang menjadi contoh *nuclear village* yang hingga kini dapat ditemukan keberagamannya. Kelompok ini tidak jarang saling bertumpang tindih pengertiannya dengan apa yang dikenal sebagai *iron triangle* atau segitiga besi. Apabila *nuclear village* merujuk pada seluruh kalangan masyarakat yang terikat oleh dukungan terhadap energi nuklir semata, maka segitiga besi memiliki pengertian yang lebih mengerucut. Istilah tersebut ditujukan pada hubungan antara politisi, birokrat, dan kelompok penekan seperti yang diilustrasikan dalam gambar di bawah 1.2.

⁵ The Japan A-bomb Victims Association



Gambar 1.2 Visualisasi hubungan antar aktor dalam *Iron Triangle*.

Sumber: I Ketut Surajaya. 1994. “Segitiga besi dan Pembaharuan Politik Jepang” dalam *Jurnal Lembaga Penelitian dan Pendidikan Kepada Masyarakat Tahun III No. 1*. Jakarta: Universitas Darma Pustaka. Halaman 26.

Dapat dilihat pada gambar 1.2 bahwa ketiga aktor saling melakukan perputaran kepentingan, dimana umumnya politisi menetapkan APBN lalu dilanjutkan oleh birokrat dengan melaksanakan APBN yang telah ditetapkan, memberikan bimbingan administrasi, perijinan, dan bantuan anggaran kepada kelompok penekan. Sebagai imbalannya, kelompok penekan yang akan memberikan bantuan dalam pemilihan umum dan bantuan berupa dana politik kepada politisi (Surajaya, 1994, hal. 26). Istilah segitiga besi sendiri sebenarnya menggambarkan bagaimana para pengambil keputusan mencegah campur tangan pihak ketiga dan meyakinkan tujuannya tercapai melalui hubungan yang saling menguntungkan (*Iron Triangle*, 2012). Dalam kata lain, hubungan tersebut cenderung kuat dan bersifat kolusif guna melindungi kepentingan masing-masing sehingga diibaratkan dengan besi. Meski demikian, benturan antar pihak dalam hubungan tersebut bukan suatu hal yang mustahil. Tarik-menarik antar sudut dalam segitiga ini terkadang menimbulkan dapat menimbulkan skandal (*Iron Triangle*, 2012).

Contoh paling mutakhir akan keberadaan segitiga besi dapat dilihat melalui bencana nuklir Fukushima Daiichi yang terjadi pada Maret 2011. Proses pengambilan keputusan yang memakan waktu relatif lama pada masa-masa genting dalam peristiwa tersebut menunjukkan adanya banyak pihak yang terlibat. Kenichi Matsumoto, salah seorang penasehat Perdana Menteri pada masa tersebut, menyebutkan bahwa TEPCO selaku perusahaan

operasional tidak kunjung memberikan informasi akurat akan kondisi PLTN Fukushima pasca gempa (Onishi dan Fackler, 2011). Di samping itu, Perdana Menteri Naoto Kan juga menyangsikan mekanisme yang berlaku khususnya pada TEPCO dan para birokrat sehingga semakin memperlambat tindakan penanganan (Onishi dan Fackler, 2011). Belum cukup sampai disana, ketidaksinambungan antara perintah pejabat perusahaan dengan tindakan yang diambil oleh manager PLTN semakin memperlihatkan betapa buruknya penanganan krisis dalam industri nuklir di Jepang (Onishi dan Fackler, 2011).⁶

Kesangsian Perdana Menteri Naoto Kan terhadap mekanisme yang berlaku dalam penanganan bencana nuklir bukan tanpa alasan, sebab TEPCO memiliki banyak tinta merah dalam riwayatnya. Salah satunya yakni di tahun 2000 ketika Kei Sugaoka, seorang inspektur nuklir yang pernah bekerja untuk General Electric di Daiichi, melaporkan perihal keretakan penering uap yang disembunyikan oleh TEPCO kepada *The Nuclear and Industrial Safety Agency of Japan* atau yang juga disebut dengan NISA (Onishi dan Belson, 2011). Alih-alih segera mengerahkan timnya untuk menyelidiki laporan tersebut, NISA justru memerintahkan TEPCO untuk melakukan pemeriksaan sendiri. Bahkan ketika NISA akhirnya melakukan penyelidikan dan menemukan adanya masalah yang lebih serius dari yang dilaporkan, TEPCO tetap diberi izin untuk beroperasi selama dua tahun. Di sisi lain, Sugaoka selaku *whistle-blower* yang berdasarkan Undang-Undang seharusnya dilindungi justru dibocorkan identitasnya oleh NISA kepada TEPCO.⁷ Maka bukan hal yang mengejutkan ketika nama pria berkebangsaan Jepang-Amerika tersebut kemudian dicoret dari industri nuklir di Jepang (Onishi dan

⁶ Pada 12 Maret 2011, sekitar 28 jam setelah tsunami, jajaran eksekutif Tepco memerintahkan para pekerja untuk mulai menyuntikkan air laut ke dalam Reaktor No. 1. Akan tetapi, 21 menit kemudian, para pejabat perusahaan tersebut memerintahkan manajer PLTN, Masao Yoshida, untuk menghentikannya. Di luar dugaan, Yoshida tidak mematuhi perintah tersebut dan diam-diam tetap menggunakan air laut. Menurut para ahli, tindakan Yoshida tersebut justru besar kemungkinan mencegah terjadinya krisis yang lebih serius.

⁷ *Whistle-blower* merupakan istilah yang digunakan untuk anggota atau mantan anggota dari suatu lembaga atau organisasi yang melaporkan perihal yang dianggap melanggar ketentuan kepada pihak yang berwenang.

Belson, 2011). Jeff Kingston menyebutkan dalam tulisannya, *Japan's Nuclear Village*, bahwa kedudukan *The Nuclear and Industrial Safety Agency* (NISA) dan *Japanese Nuclear Safety Commission* (NSC) yang berada dibawah Kementerian Industri dan Perdagangan Jepang (MITI) menjadi alasan dibalik pertanyaan terhadap independensi kedua lembaga tersebut. Para birokrat dalam kedua lembaga memiliki kemungkinan yang besar untuk menyusun dan menghasilkan kebijakan yang berpihak pada perusahaan, sebab mereka bertanggung jawab pada para politisi terpilih yang menerima dana kampanye dari para perusahaan terkait (Murphy, 2014).

Pada tahun 2002, setelah ulah TEPCO akhirnya diketahui khalayak umum, ketua dan presiden perusahaan tersebut mengundurkan diri. Meski demikian, keduanya kemudian diberikan peran sebagai penasihat perusahaan oleh TEPCO. Praktik semacam ini lebih dikenal dengan istilah *amakudari* yang secara harfiah memiliki arti turun dari langit (Colignon dan Usui, 2013). Makna dari istilah tersebut berakar pada masa sebelum Perang Dunia II dimana kaisar dipandang sebagai tuhan sekaligus perwujudan dari bangsa Jepang sehingga pegawai negeri sipil dianggap bekerja untuk tuhan dan bangsa (Colignon dan Usui, 2013). Pekerjaan tersebut dinilai sebagai suatu pekerjaan yang mulia dan para pelakunya diandaikan berada di langit. Hal ini yang kemudian membentuk anggapan bahwa pegawai negeri sipil turun dari langit ketika bekerja di sektor “duniawi”, yakni sektor yang lekat dengan kepentingan pribadi dan materialisme, selepas bekerja pada kekaisaran (Colignon dan Usui, 2013). Praktik inilah yang mendasari segitiga besi dalam politik dan pemerintahan Jepang. Menurut *Kodansha Encyclopedia of Japan*, kini istilah tersebut lebih mengacu pada birokrat yang dipekerjakan kembali pada posisi strategis dalam sektor swasta setelah pensiun atau mengundurkan diri dari sektor pemerintahan, contohnya sebagai penasehat perusahaan. Bagi sektor swasta, keahlian khusus dan jaringan koneksi yang diperoleh mantan birokrat selama bekerja di sektor pemerintahan menjadi suatu nilai yang menguntungkan sebab mampu menjadi jembatan bagi sektor swasta dan sektor pemerintahan. Akan tetapi, praktik demikian juga dapat ditemukan

dalam sektor swasta sendiri sebab keahlian, koneksi, pengalaman, dan/atau informasi yang dimiliki oleh para mantan pekerja merupakan sebuah “aset” dan akan memakan waktu, tenaga, dan/atau biaya apabila harus merekrut pekerja baru.

2.3 Para Pengambil Keputusan

Dalam *The Decision-Making Approach to the Study of International Politics*, Snyder, Bruck, dan Sapin menjelaskan bahwa sikap politik suatu negara tidak lain merupakan sebuah keputusan yang diambil oleh pihak dengan wewenang untuk bertindak atas nama negara. Begitu pula dengan kerjasama dalam penggunaan energi nuklir secara damai dengan India, keputusan yang akhirnya diambil oleh Jepang pada penghujung tahun 2015 tersebut tidak dapat dilepaskan dari petahana pada masa tersebut. Oleh sebab itu, penulis menilai perlunya penjelasan tersendiri mengenai sosok yang bertanggung jawab dibalik keputusan tersebut agar dapat menganalisis lebih baik melalui kacamata sang pengambil keputusan.

Setelah melalui sekian tahun proses negosiasi, Kerjasama dalam Penggunaan Energi Nuklir Secara Damai dengan India pada akhirnya tercapai di bawah pemerintahan Shinzo Abe. Baginya, politik bukanlah suatu lingkungan yang asing karena ia terlahir dalam keluarga politik dari sisi ayah maupun dari sisi ibu. Ayahnya, Abe Shintaro, merupakan mantan Menteri Luar Negeri Jepang yang bertugas dari 1982 hingga 1986, sedangkan kakeknya dari pihak ibu, Nobusuke Kishi, merupakan mantan Perdana Menteri Jepang ke-56 (1957-1958) sekaligus ke-57 (1958-1960) (Edström, 2007). Bagi sebagian masyarakat, keyakinan dan nilai-nilai politik Abe tidak dapat dilepaskan dari Kishi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Katsuei Hirasawa, salah seorang anggota parlemen Jepang, pada wartawan majalah *Time*, Bryan Walsh, “Dia (Shinzo Abe) mewarisi DNA politik kakeknya” (Encyclopedia of World Biography, tanpa tanggal). Hal ini senada dengan tulisan Abe yang diterbitkan pada tahun 2006, *Utsukushii kuni e* (Towards a Beautiful Country: A Confident and Proud Japan), dalam rangka kampanye

untuk pemilihan umum yang akan datang; ia menyebutkan bahwa Kishi merupakan seorang pahlawan baginya dan betapa ia mengagumi falsafah dan tindakan politik kakeknya tersebut (Encyclopedia of World Biography, tanpa tanggal).

Sekilas mengenai Nobusuke Kishi, ia merupakan seorang tokoh politik yang dikenal dengan kebijakan agresifnya terutama dalam hubungan luar negeri (Jiji Press English News Service, 2012). Ialah anggota kabinet yang bertanggung jawab dibalik peperangan melawan Amerika Serikat pada tahun 1940 (Edström, 2007). Ia juga sosok pejabat senior yang ditugaskan untuk memimpin pembangunan industri di Manchukuo, negara boneka Jepang di bagian timur laut Cina, pada 1936-1939 (Edström, 2007). Karena eksploitasi dan kekejaman rezimnya terhadap buruh setempat, ia kemudian didakwa sebagai penjahat perang kelas A.⁸ Meski demikian, dakwaan tersebut baru mengantarkannya ke penjara setelah Pedang Dunia II berakhir di tahun 1945 (Edström, 2007). Setelah masa tahannya berakhir pada 1948, Kishi mendapat tawaran sebuah posisi dalam bisnis karena pengecualian terhadap dirinya untuk menduduki kursi kekuasaan dalam politik setelah apa yang terjadi padanya (Edström, 2007). Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sub-bab sebelumnya, praktik semacam ini merupakan hal yang lazim terjadi di Jepang. Akan tetapi, Kishi pada akhirnya kembali menapakkan kaki ke dunia politik pada tahun 1952 meski terdapat catatan merah dalam riwayat karir politiknya (Edström, 2007). Dua tahun kemudian, ia dikeluarkan dari Partai Liberal akibat intrik anti-Yoshida yang merupakan ketua Partai Liberal sekaligus Perdana Menteri pada masa tersebut. Ia beralih menjadi sekutu musuh utama Yoshida Shigeru, Ichiro Hatoyama, dan ditunjuk sebagai jenderal sekretaris dalam Partai Demokrat yang dipimpin oleh Hatoyama (Edström, 2007). Semenjak itu, Kishi tampil sebagai politisi konservatif dengan semangat anti-komunisme dan dukungan terhadap revisi

⁸ Kelas A: Perencana dan pelaksana perang atau dalam kata lain para pemimpin perang;
Kelas B: Pelanggaran terhadap aturan perang internasional seperti melakukan serangan pada rumah sakit;
Kelas C: Pembunuhan dan penganiayaan terhadap penduduk sipil.

konstitusional. Ia menjadi salah satu diantara ahli strategi politik yang menggabungkan dua partai konservatif menjadi apa yang sejak 1955 hingga saat ini dikenal dengan Partai Demokratik Liberal/*Liberal Democratic Party* (LDP). Setahun setelah didirikannya partai yang mengusung nasionalisme sebagai salah satu ideologinya tersebut, Kishi maju dalam pemilihan umum melawan Tanzan Ishibashi. Meski kalah suara, ia pada akhirnya menggantikan Ishibashi menjadi orang nomor satu di Jepang dua bulan setelah lawannya tersebut mengundurkan diri karena faktor kesehatan (Edström, 2007).

Jangka waktu yang ditempuh Kishi hingga menjadi seorang Perdana Menteri setelah didakwa sebagai penjahat perang mengindikasikan adanya hubungan personal yang kuat dengan elit politik dan bisnis Jepang serta kemampuannya dalam memanipulasi hubungan tersebut. Tidak heran apabila ia dijuluki sebagai ahli *machiai seiji* atau politik dibalik layar (Edström, 2007). Sosoknya sebagai mantan Perdana Menteri terbagi dalam dua opini publik; dikagumi oleh sebagian masyarakat dan kontroversial dengan catatan merah di masa pra-Perang Dunia II bagi sebagian yang lain. Sudah jelas terlihat bahwa Abe menjadi bagian dari yang pertama disebutkan. Ia bahkan memiliki semangat yang sama dengan kakeknya untuk mengubah rezim pasca Perang Dunia. Karir politik Abe sendiri dimulai pada tahun 1993 dengan menjadi seorang anggota parlemen (Encyclopedia of World Biography, tanpa tanggal). Sosoknya belum dikenal luas oleh publik hingga tahun 2002. Dalam suatu kesempatan di tahun tersebut, Abe yang pada saat itu merupakan seorang wakil sekretaris kabinet ditugaskan untuk mendampingi Perdana Menteri Koizumi Junichiro berkunjung ke Pyongyang, Korea Utara. Ia mendesak Koizumi agar tidak menandatangani Deklarasi Pyongyang yang sebelumnya telah disepakati oleh Jepang dan Republik Rakyat Demokratik Korea. Hal ini dilatarbelakangi oleh terungkapnya penculikan 13 warga negara Jepang yang dilakukan oleh Korea Utara pada tahun 1970-an dan 1980-an (Pletcher, tanpa tanggal). Sikap tegas Abe

tersebut kemudian menjadi perbincangan dalam opini publik dan menuai pujian masyarakat Jepang yang menentang tindakan pemerintah Korea Utara.

Popularitas yang diperoleh Abe seakan menjadi katalis bagi kiprahnya dalam politik. Setahun setelah mendampingi Koizumi ke Korea Utara, ia ditunjuk oleh Perdana Menteri Jepang ke-87 tersebut untuk menjadi sekretaris jenderal Partai Demokratik Liberal (Edström, 2007). Penunjukan tersebut tidak lain merupakan bagian dari strategi Koizumi dalam mengambil hati masyarakat untuk pemilihan umum yang akan datang dengan memanfaatkan popularitas Abe. Di sisi lain, keputusan Koizumi menjadi sebuah peningkatan bagi Abe dalam tangga politik; dengan menduduki posisi tersebut, Abe menjadi orang nomor dua dalam partai konservatif sayap kanan terbesar di Jepang; ia tidak hanya memperoleh kekuasaan dalam internal partai namun juga berpotensi untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah secara substansial. Posisi ini pula yang dahulu membawa kemasyhuran dan peruntungan kepada para pendahulunya seperti Mori Yoshiro, Kishi Nobusuke, dan Sato Eisaku.

Hanya berselang dua tahun kemudian, Koizumi kembali menunjuk Abe untuk menduduki sebuah posisi dalam percaturan politik di dalam negeri. Kala itu ia ditunjuk sebagai sekretaris dalam kabinet Koizumi; posisi yang membuatnya beralih dari orang nomor dua dalam LDP menjadi orang nomor dua dalam pemerintahan Jepang. Keputusan tersebut mengindikasikan Abe sebagai kandidat yang kuat di mata Koizumi untuk menduduki posisi kepala pemerintahan selanjutnya. Hal ini juga diikuti oleh opini serupa dalam masyarakat. Pada akhirnya, strategi Koizumi tersebut berjalan sesuai rencana ketika Abe, untuk pertama kalinya, ditunjuk oleh parlemen dan dinobatkan oleh Kaisar sebagai Perdana Menteri Jepang pada 26 September 2006 (Edström, 2007). Akan tetapi pemerintahan pertama Abe tidak bertahan lama. Tingkat kepopuleran Perdana Menteri Jepang termuda sejak Perang Dunia II tersebut terus menurun setelah adanya keributan soal pensiun dan berbagai skandal yang dilakukan oleh beberapa menteri dalam kabinetnya (BBC Indonesia, 2007). Hal tersebut disusul dengan kekalahan Partai Liberal

Demokrat dalam pemilihan majelis tinggi di bulan Juli yang menimbulkan desakan pada Abe untuk mengundurkan diri. Meski awalnya memilih untuk tetap bertahan dan mengatakan akan terus melakukan reformasi, namun akhirnya Abe menyatakan pengunduran diri pada 12 September 2007 (BBC Indonesia, 2007).

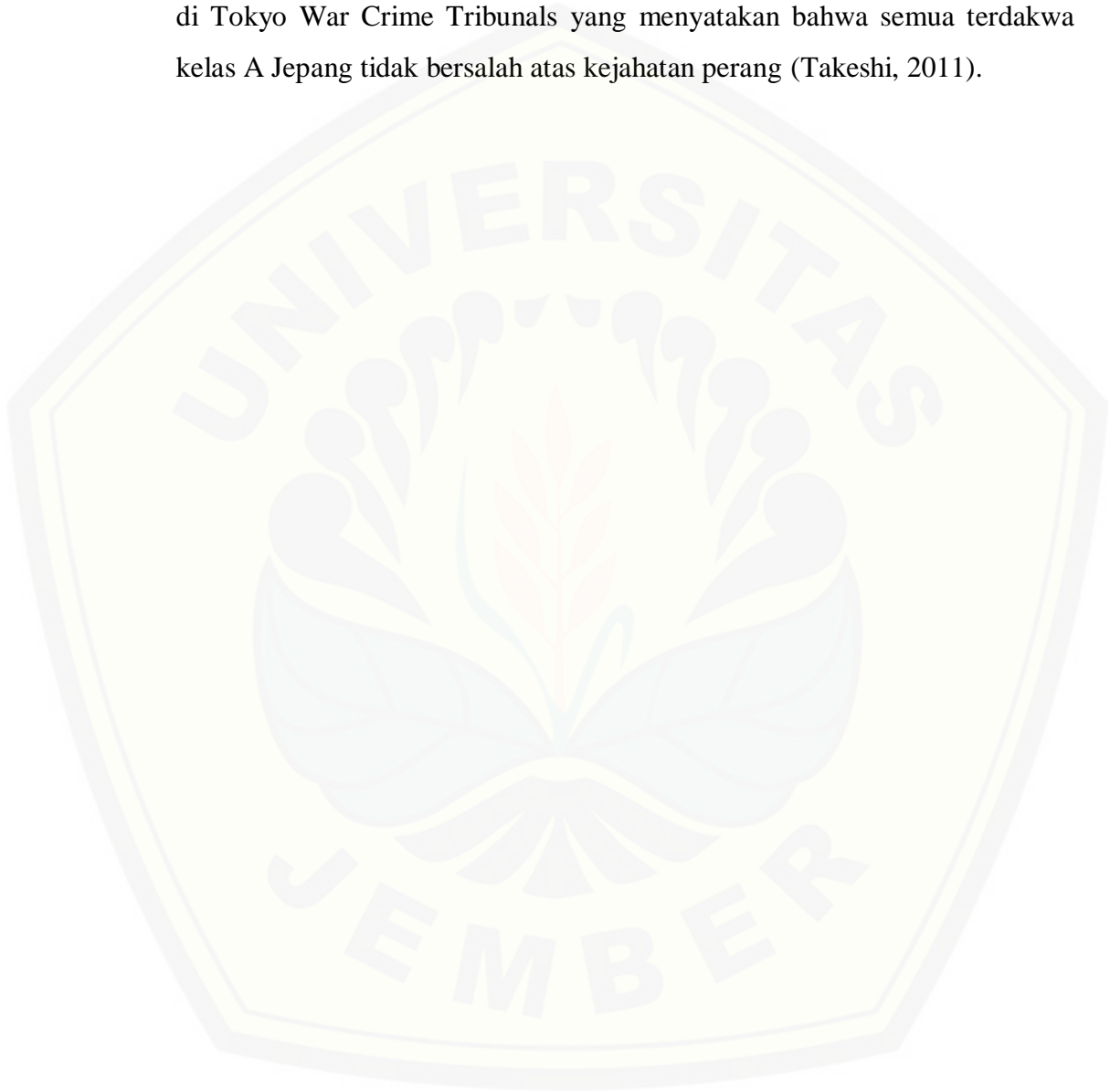
Setelah lima tahun berlalu dengan lima kali pergantian kepala pemerintah, Abe kembali memperoleh kepercayaan untuk menjadi Perdana Menteri Jepang. Ia dipilih oleh Diet setelah partainya, Partai Liberal Demokrat, memenangkan pemilihan umum dengan meraih 294 dari total 480 kursi di parlemen rendah bersama dengan mitra koalisinya pada awal bulan Desember 2012 (Fackler, 2012). Kemenangan tersebut merupakan sebuah *comeback* bagi LDP setelah lebih dari tiga tahun diambil alih oleh DPJ. Fenomena tersebut sedikit banyak dilatarbelakangi oleh kekecewaan publik terhadap serangkaian pemerintah yang tidak berhasil membebaskan perekonomian Jepang dari stagnansi. Oleh sebab itu, ekonomi menjadi isu prioritas dalam kampanye Abe dan hal ini dapat ditemukan dalam program pemulihan ekonomi yang dikenal dengan “Abenomics”. Program tersebut terdiri atas tiga kebijakan yaitu perluasan fiskal, pelonggaran moneter, dan reformasi struktural (Mursitama, 2013).

Dalam hubungan bilateral dengan India, Abe dapat dikatakan sebagai Perdana Menteri Jepang yang paling antusias terhadap negara tersebut meski Perdana Menteri Mori yang membuka lembaran baru dengan kunjungannya di tahun 2000 dan Perdana Menteri Koizumi yang membawanya ke dalam babak baru dengan menjalin kerjasama keamanan. Sebelum memimpin pemerintahan untuk yang pertama kali, Abe telah menaruh perhatian pada negara dengan populasi terbesar kedua di dunia tersebut dengan menuangkannya ke dalam tiga halaman di bukunya, *Utsukushii kuni e*. Dalam tulisannya tersebut, ia menjelaskan bagaimana pencapaian kepentingan nasional Jepang dapat lebih terdepan dengan memperkuat hubungan dengan India (Chellaney, 2007). Abe menyebutkan akan kemungkinan sebuah kerjasama strategis dengan India, Australia, dan

Amerika Serikat dan memperkirakan bahwa hubungan bilateral antara Jepang dan India dalam jangka waktu 10 tahun mendatang akan melampaui hubungan bilateral Jepang-Amerika Serikat dan Jepang-Cina (Jain, 2008b). Pemikiran tersebut kemudian mulai diwujudkan dalam kabinet pertamanya ketika Perdana Menteri India, Manmohan Singh, berkunjung ke Jepang pada Desember 2006 dengan membentuk *Strategic and Global Partnership*. Salah satu hasil dari pertemuan tersebut tidak lain ialah komitmen bersama antara kedua negara untuk bekerjasama dalam penggunaan energi nuklir secara damai yang menuai pro dan kontra di kedua negara. Langkah tersebut ia susul di tahun berikutnya ketika berkunjung ke India dengan mengikutsertakan negara tersebut ke dalam *Quadilateral Initiative* yang dapat dikatakan sebagai perluasan dari Australia-Japan-U.S *Trilateral Security Dialogue* (Chellaney, 2007).

Antusiasme Abe tidak sekedar disambut dengan baik oleh India, ia memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pidato dalam *joint session* di parlemen India yang tidak diperoleh mantan Presiden Amerika Serikat, George W. Bush, maupun mantan Presiden Republik Rakyat Cina, Hu Jintao (Chellaney, 2007). Kedekatan Abe dengan India sebenarnya berakar jauh sebelum ia menuangkan antusiasmenya ke dalam tulisan. Hal ini, sekali lagi, tidak dapat dilepaskan dari kakeknya. Eksploitasi dan kekejaman rezim yang dipimpin oleh Kishi di Manchukuo tidak hanya membuatnya dikenal sebagai penjahat perang kelas A terutama di kalangan penduduk Republik Rakyat Cina, namun juga membuat Jepang dikucilkan oleh negara-negara tetangganya seusai Perang Dunia II. Akan tetapi, India justru menunjukkan sikap yang berbeda. Negara persemakmuran Inggris tersebut memberikan sambutan hangat kepada Kishi ketika berkunjung ke New Delhi pada tahun 1957 (Krishnan, 2014). Perdana Menteri Jawaharlal Nehru bahkan memperkenalkannya pada khalayak ramai dengan mengatakan “*This is the Prime Minister of Japan, a country I hold in greatest esteem*” (Langa dan Bhattacharjee, 2017). Oleh sebab itu, Abe menggunakan narasi nasionalis dalam pendekatannya terhadap India. Tepatnya pada kunjungan di tahun

2007, Abe menyebut India sebagai “mother country of Judge Pal” dan bertemu dengan Prasanta, putra dari hakim Pal (Hemmings dan Kuroki, 2013). Radhabinod Pal, atau yang lebih dikenal dengan hakim Pal, merupakan seorang hakim berkebangsaan India sekaligus satu-satunya hakim di Tokyo War Crime Tribunals yang menyatakan bahwa semua terdakwa kelas A Jepang tidak bersalah atas kejahatan perang (Takeshi, 2011).



BAB III

KEBANGKITAN INDIA SEBAGAI AKTOR GLOBAL

Kementrian Luar Negeri Jepang mencatat bahwa Jepang dan India telah menjalin hubungan diplomatik sejak kedua negara menandatangani perjanjian damai pada 28 April 1952 (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2017b). Meski semenjak itu hubungan kedua negara berjalan dengan baik dalam arti tanpa adanya konflik, namun belum cukup untuk dikatakan terjalin hubungan yang substansial. Tidak adanya titik temu antara kepentingan masing-masing membuat lemahnya hubungan bilateral kedua negara (Jain, 2010). Sebagai contoh, hal ini dapat dilihat melalui keputusan Jepang yang mengambil sikap netral terhadap permintaan bantuan yang diajukan oleh India pada Perang Himalaya dengan Tiongkok di tahun 1962 (Paul, 2008).⁹ Salah satu penyebab lemahnya hubungan tersebut datang dari perbedaan sikap terhadap kontestasi kekuasaan di era Perang Dingin. India memilih untuk bergabung dalam Gerakan Non-Blok, namun di saat yang sama, cenderung bersandar pada Uni Soviet dalam urusan politik luar negerinya (Horimoto, 2015). Di sisi lain, Jepang menempatkan diri pada blok Barat dan menjadikan Amerika Serikat sebagai sekutunya (Ghosh, 2008).

Penyebab lain terhadap lemahnya hubungan bilateral antara Jepang dan India datang dari faktor ekonomi. Rendahnya pertumbuhan ekonomi, kurangnya sumber daya dan potensi pasar, serta perekonomian yang *highly regulated* membuat India tidak menarik perhatian dan tidak memperoleh prioritas dalam kepentingan Jepang (Ghosh, 2008).¹⁰ Kondisi tersebut sempat berusaha diperbaiki oleh India melalui kunjungan Perdana Menteri Indira Gandhi ke Tokyo di tahun 1982. Kunjungan Perdana Menteri perempuan pertama di India ini sebenarnya mendapat

⁹ Pada masa tersebut, Jepang menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang memiliki kredibilitas di mata dunia dan berupaya untuk mempertahankannya dengan mencari peluang-peluang baru serta memelihara hubungan perdagangan yang lebih baik dengan Tiongkok maupun negara-negara di Asia lainnya. Berkenaan dengan upaya tersebut, India dinilai kurang potensial bagi Jepang sedangkan India menilai sebaliknya.

¹⁰ *Highly regulated* dalam hal ini memiliki arti ketatnya dan mungkin pula rumitnya peraturan bagi perusahaan asing untuk mendirikan usaha di India sebab keterlibatan pemerintah yang menguasai sistem ekonomi India. Sistem ekonomi yang bersifat tertutup tersebut tidak lain merupakan buah dari politik luar negeri India yang condong terhadap Uni Soviet.

kunjungan balasan dari Perdana Menteri Jepang, Nakasone Yasuhiro, dua tahun kemudian namun upaya kedua pemimpin tersebut belum cukup membawa hubungan bilateral Jepang dan India ke arah yang substansial (Ghosh, 2008).

Kondisi perekonomian India pada akhirnya memiliki wajah baru setelah serangkaian peristiwa global terjadi pada 1989-1991. Berawal dari keruntuhan Uni Soviet yang membuat India kehilangan mitra perdagangan terbesar sekaligus pemasok utama minyak bumi yang murah baginya (Gosal, 2013). Hal ini membuat India tidak memiliki pilihan selain membeli minyak dari pasar bebas. Kondisi yang harus dihadapinya juga tidak semakin membaik ketika peperangan berlangsung di teluk Persia selama 1990-1991. Peristiwa yang lebih dikenal dengan istilah Perang Teluk I tersebut mengakibatkan peningkatan harga minyak dunia dan membuat para pekerja asal India di Timur Tengah terpaksa kembali ke negara mereka (Pedersen, 2016, hal. 114). Padahal, India menerima pengiriman uang dalam valuta asing yang cukup besar dari para pekerja tersebut. Alhasil, cadangan devisa India merosot dan tagihan impor minyak menjadi berlipat ganda (Pedersen, 2016, hal. 114). India kemudian jatuh dalam krisis ekonomi yang membuat Perdana Menteri India, P. V. Narasimha Rao, bersama dengan menteri keuangannya, Manmohan Singh, memutuskan untuk melakukan reformasi terhadap sistem ekonomi India di tahun 1991. Negara yang sebelumnya menerapkan sistem ekonomi tertutup tersebut pada akhirnya menurunkan tingkat tarif, mereformasi kebijakan nilai tukar, meliberalisasi kebijakan perizinan industri, dan melonggarkan kebijakan penanaman modal asing langsung (Gosal, 2013). Keputusan tersebut diambil tidak lain guna memperoleh pinjaman yang ditawarkan oleh *The International Monetary Fund* (IMF) dan Bank Dunia.

Berdasarkan catatan Bank Dunia, India mengalami peningkatan persentase pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga lima kali lipat dalam satu tahun pasca reformasi ekonomi. Meski demikian, ia menyadari bahwa reformasi terhadap sistem ekonominya tidak cukup untuk menghadapi dinamika politik yang terjadi di panggung internasional. Oleh sebab itu, ia bergiat dalam mengintegrasikan diri ke dalam ekonomi global. Upaya tersebut ia wujudkan dengan memperbaiki hubungannya terutama dengan negara-negara yang memiliki

kekuatan ekonomi. Hal ini salah satunya ditunjukkan oleh Perdana Menteri Rao melalui kunjungan ke Jepang pada Juni 1992. Ia menggunakan kesempatan tersebut untuk menyampaikan harapannya terhadap kerjasama Jepang dalam pembangunan ekonomi India. Menanggapi hal tersebut, Menteri Luar Negeri Jepang kemudian mensponsori lebih dari 100 utusan yang terdiri atas perwakilan perusahaan, industrialis, pemodal, serta pejabat dari kementerian perdagangan dan industri internasional, kementerian keuangan, dan kementerian luar negeri untuk menyelidiki sektor-sektor dalam perekonomian India yang berpeluang menjadi lahan investasi bagi Jepang (Paul, 2008). Hasilnya, ekspor India ke Jepang meningkat dari Rs 303,9 juta pada tahun 1990-1991 menjadi Rs 1,59 milyar pada tahun 1999-2000 (Paul, 2008). Disamping Jepang, Amerika Serikat turut menjadi negara yang dituju oleh India dalam upaya mengintegrasikan diri ke dalam ekonomi global. Selama masa jabatannya, Rao telah melakukan kunjungan dan dialog resmi dengan presiden Amerika Serikat; yang pertama, ketika ia bertemu dengan Presiden George W. Bush dalam kunjungannya ke New York dalam rangka menghadiri *UN Security Council Summit* di New York pada tahun 1992, dan yang kedua, saat ia berhasil menambahkan nilai ekonomi terhadap pertemuannya dengan Presiden William J. Clinton dalam kunjungan ke Washington pada tahun 1994.¹¹

Bagi India, keruntuhan Uni Soviet bukan hanya berarti kehilangan mitra perdagangan terbesar yang membawanya pada krisis ekonomi, namun juga kehilangan dukungan politik terbesar di panggung internasional. Oleh sebab itu, India dapat dikatakan berada dalam kondisi yang *politically insecure*. Hal ini menguatkan kebutuhannya untuk melakukan orientasi ulang terhadap politik luar negeri.¹² Sayangnya, dalam kondisi tersebut, *South Asian Association for Regional Cooperation* (SAARC) sebagai lembaga kawasan setempat dinilai tidak efektif dalam menjalankan fungsi sebagai wadah untuk mempererat persahabatan, menjaga

¹¹ Nilai ekonomi yang dimaksud antara lain meningkatkan frekuensi kunjungan kenegaraan, melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai energi terbarukan, serta mempromosikan pertumbuhan dalam investasi dan perdagangan.

¹² Kebutuhan India untuk melakukan orientasi ulang terhadap politik luar negeri pada dasarnya telah muncul bersamaan dengan berakhirnya Perang Dingin. Perubahan dalam tatanan politik global menyebabkan pemilahan kekuasaan, blok Timur dan blok Barat, menjadi tidak lagi signifikan sehingga tidak sedikit negara yang perlu menyesuaikan diri, termasuk India.

perdamaian kawasan, dan memperkuat diri bersama, melainkan cenderung menjadi medan perang bagi masalah-masalah bilateral juga tidak memperbaiki keadaan. Maka tidak heran apabila India melirik keluar Kawasan, terlebih saat ia menyadari adanya pertumbuhan ekonomi yang mengesankan di sejumlah negara di Asia. Beberapa negara tersebut antara lain Tiongkok, Indonesia, Jepang, Malaysia, dan Thailand yang mencapai tingkat pertumbuhan hingga 3-5% per tahun, lalu Hong Kong, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan yang melampaui kelima negara tersebut dengan tingkat pertumbuhan lebih dari 6% per tahunnya (Sarel, 1996). Anomali tersebut menarik perhatian India yang telah menentukan aspek ekonomi sebagai fokus utama dalam orientasi baru politik luar negerinya (Paul, 2008). Ketertarikan ini kemudian diwujudkan Rao dalam “melihat ke timur” pada tahun 1991. “Melihat ke timur” atau yang juga dikenal dengan *Look East* merupakan sebuah kebijakan untuk memperbaharui hubungan politik, meningkatkan integrasi ekonomi, dan menjalin hubungan pertahanan dengan negara-negara lain. Upaya tersebut awal mulanya hanya ditujukan pada Asia Tenggara, namun kemudian mencakup wilayah Asia Timur, Australia, dan Selandia Baru sejak ditandatanganinya *Treaty of Amity and Cooperation* pada 8 Oktober 2003.¹³

Keputusan Rao untuk “melihat ke timur” sebenarnya juga tidak dapat dilepaskan dari hubungan India dengan Tiongkok. Sengketa perbatasan di tahun 1962 tidak hanya meregangkan hubungan kedua negara, namun juga meninggalkan kebencian dan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap Tiongkok. Oleh sebab itu, Asia Tenggara menjadi kawasan dengan negara-negara yang ia tuju dalam babak pertama kebijakannya tersebut. Meski kemudian hubungannya dengan Tiongkok berangsur membaik di tahun 1990-an, India tetap menaruh kewaspadaan terhadap negara yang memiliki kedekatan dengan Pakistan tersebut.¹⁴ Horimoto mengandaikan hubungan antara kedua negara dalam tulisannya, *Japan-India Rapprochement and Its Future Issues*, dengan saling menjabat tangan kanan namun

¹³ Sejak tahun 1992, India telah menjadi mitra wicara ASEAN namun hanya bersifat sektoral. Status tersebut kemudian diubah menjadi mitra wicara penuh di tahun 1995 dalam KTT Ke-5 ASEAN yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand.

¹⁴ Pakistan dikenal sebagai musuh bebuyutan India. Keduanya sempat terlibat dalam peperangan di tahun 1965 dan tahun 1971 yang kemudian melahirkan Bangladesh.

bersiap akan potensi serangan pada tangan kiri. Kewaspadaan tersebut salah satunya diwujudkan dalam uji coba nuklir Pokhran-II yang dilakukan pada tahun 1998. India seketika menjadi sorotan dunia dan mendapat kecaman dari berbagai pihak karena tindakannya tersebut, namun ia tidak gentar sebab baginya terdapat hal lain yang merupakan ancaman sebenarnya terhadap keamanan nasional. Ancaman tersebut tidak lain datang dari negara-negara tetangganya sendiri yaitu; 1) Pakistan yang memiliki riwayat hubungan konflikual dengan India dan dikabarkan menyimpan senjata nuklir pada tahun 1990 guna menyokong kekuatan militernya dalam konflik perbatasan dengan India, dan 2) Tiongkok yang melakukan serangkaian uji coba nuklir dalam pertengahan awal tahun 1990-an (Mathur, 2012, hal. 24).

Akibat uji coba nuklir Pokhran-II, hubungan bilateral antara Jepang dan India yang mulai berkembang di awal tahun 1990-an jatuh pada titik terendah (Ghosh, 2008). Jepang, dengan sensitivitasnya terhadap senjata nuklir, secara sigap mengemukakan keras dan tegas tindakan India tersebut. Ia menarik duta besarnya untuk India, Hiroshi Harabayashi, yang di kemudian hari mengungkapkan persepsinya terhadap uji coba nuklir tersebut.

“It was particularly perceived as a slap in the face by the Japanese people. To be frank, I was rudely shocked and felt betrayed by India, which I believed to be an anti-nuclear champion. Pokhran test chilled our relationship to a great extent (Mathur, 2012, hal. 24).”

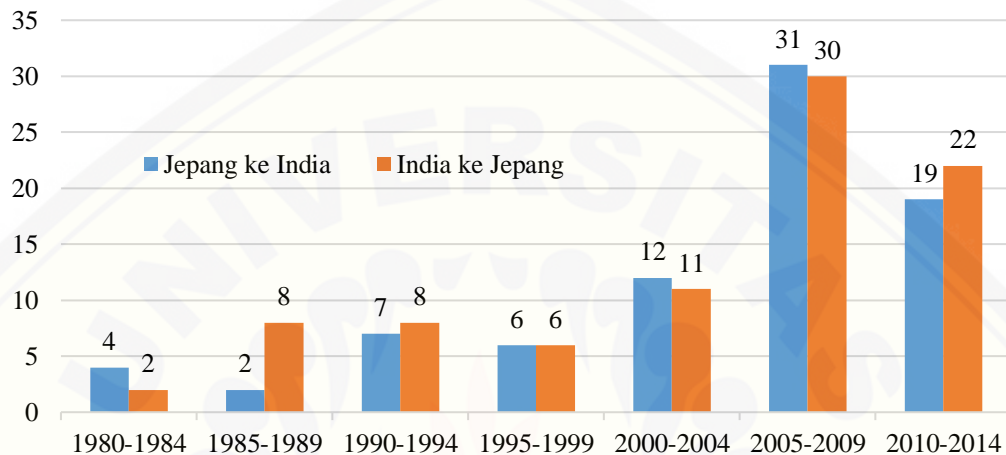
Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa uji coba nuklir yang dilakukan oleh India merupakan persoalan yang berarti bagi Jepang hingga ia kehilangan kepercayaan pada India yang sebelumnya dianggap memiliki kesamaan pandangan terhadap nuklir. Hal ini dicerminkan melalui pembatalan ¥133 juta dana bantuan dan ¥3.5 juta dana hibah yang awal mula hendak diberikan untuk pembangunan India (Mathur, 2012, hal. 24) Tidak hanya itu, Jepang juga menarik kesediaan dirinya untuk menjadi tempat perhelatan *India Development Forum*. Ia turut memberlakukan pemeriksaan terhadap pinjaman dan mengenakan pengendalian yang ketat terhadap transfer teknologi ke India (Sahu, 2016). Sebagai syarat untuk memperoleh kembali sejumlah Bantuan Pembangunan Pemerintah (*Official Development Assistane*) tersebut, India diharuskan menandatangani

Comprehensice Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) (Horowitz dan Narang, 2014). Akan tetapi India memiliki pandangannya sendiri; ia menganggap bahwa uji coba nuklir yang dilakukannya merupakan sebuah upaya untuk membangun kemampuan pertahanan diatas kaki sendiri. Ia justru heran akan sikap yang ditunjukkan oleh Jepang, sebab negara tersebut bukan hanya berlindung dibawah payung nuklir Amerika Serikat namun juga tidak bertindak tegas terhadap serangkaian uji coba nuklir Tiongkok di tahun 1990-an. Sebagaimana yang disampaikan oleh duta besar India di Amerika Serikat, Naresh Chandra, dalam sebuah wawancara “[...] *lecture from Canada, or Japan, or Australia carries no weight. Those nations have nuclear guarantees, a nuclear umbrella* (Mathur, 2012, hal. 24).”

Hanya berselang dua tahun kemudian, India mendapat kunjungan dari Amerika Serikat yang dahulu membatalkan rencana kunjungannya di tahun yang sama dengan pelaksanaan uji coba nuklir Pokhran-II. Melalui kunjungan tersebut, Bill Clinton menjadi presiden Amerika Serikat pertama yang melakukan kunjungan kenegaraan ke India setelah 22 tahun lamanya (Horimoto, 2015). Dalam pertemuan kedua kepala negara ini, Clinton tidak hanya menarik sanksi yang ia jatuhkan pada India atas tindakannya di tahun 1998, namun juga membukakan pintu pada perjanjian antara perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dengan firma India dan Bangladesh yang bernilai milyaran US\$ (Weiss, 2007). Meski demikian, Clinton menggarisbawahi bahwa pemerintahannya tidak ingin terlibat dalam perdagangan nuklir maupun segala bentuk kerjasama lain yang berhubungan dengan militer selama India tidak melakukan konsesi terhadap program nuklirnya (Weiss, 2007). Langkah serupa kemudian diambil oleh Perdana Menteri Jepang, Yoshiro Mori, pada bulan Agustus di tahun yang sama. Ia berkunjung ke New Delhi layaknya tanpa ada kemarahan atau kekecewaan yang tersisa terhadap peristiwa dua tahun sebelumnya. Berkat kunjungan tersebut, Jepang dan India bukan hanya berhasil mencairkan ketegangan dalam hubungan bilateral mereka, namun juga mempertemukan diri dalam satu bingkai substansial berupa *Global Partnership between Japan and India*.

Ketegangan yang mencair membawa hubungan bilateral Jepang dan India kembali normal. Kondisi tersebut salah satunya dapat dilihat melalui intensitas kunjungan kenegaraan diantara kedua negara, baik dari Jepang ke India maupun sebaliknya.

Tabel 3.1 Kunjungan kenegaraan antara Jepang dan India



Sumber: Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2015. *Japan-India Relations (Basic Data)* diakses dari <https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/india/data.html> pada 07/09/2017

Sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 3.1, intensitas kunjungan India selama tahun 1980-an cenderung rendah karena tidak adanya titik temu diantara kedua negara selama Perang Dingin. Intensitas tersebut kemudian mulai meningkat sejak berakhirnya Perang Dingin di penghujung tahun 1980-an namun tidak banyak berubah sepanjang satu dasawarsa selanjutnya. Hal ini dikarenakan India masih dalam masa penyesuaian diri terhadap tatanan baru dunia sehingga belum cukup menarik perhatian Jepang untuk menempatkan India dalam prioritas kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu pula, dapat dilihat bahwa intensitas kunjungan India ke Jepang lebih tinggi dibandingkan intensitas kunjungan Jepang ke India sejak akhir tahun 1980-an hingga pertengahan 1990-an. Lalu timbul ketegangan dalam hubungan bilateral kedua negara akibat perbedaan persepsi terhadap uji coba nuklir Pokhran-II di tahun 1998 sehingga membuat intensitas kunjungan pada 1995-1999 mengalami penurunan. Meski demikian, pada lima tahun berikutnya, intensitas kunjungan kembali meningkat setelah Mori berhasil mencairkan ketegangan diantara kedua negara. Intensitas tersebut bahkan melonjak lebih dari dua kali lipat

selama tahun 2005-2009. Melalui lonjakan intensitas kunjungan ini, dapat diasumsikan bahwa tumbuh saling ketergantungan antara kedua negara sejak tahun 2000.

Normalisasi hubungan India dengan *major powers* seperti Amerika Serikat dan Jepang membawa implikasi pada keterlibatannya dalam isu-isu strategis di panggung internasional. Contohnya saja *The Next Steps in Strategic Partnership* (NSSP) yang diluncurkan India bersama dengan Amerika Serikat di tahun 2004 sebagai inisiatif diplomatik kedua negara untuk bekerjasama dalam bidang-bidang strategis seperti nuklir, ruang angkasa, dan militer (Office of the Press Secretary, 2005). Kerangka kerjasama tersebut kemudian disempurnakan oleh kedua negara dalam kunjungan Perdana Menteri Manmohan Singh ke Washington pada bulan Juli 2005. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sama, kedua negara dapat sekaligus meluncurkan pernyataan bersama mengenai *U.S-India civil nuclear cooperation*. Pernyataan bersama tersebut tidak hanya membuka akses terhadap bahan, peralatan, dan teknologi nuklir bagi India, namun juga mengakhiri sanksi nuklir yang Amerika Serikat jatuhkan padanya di tahun 1974 karena uji coba nuklir Pokhran-I (Weiss, 2007). Hal ini dapat terwujud salah satunya karena pemerintahan Bush dikenal memiliki antipati secara kelembagaan terhadap rezim pengendalian dan pembatasan senjata (*arms control regime*). Maka tidak heran ketika India memperoleh pengecualian untuk melakukan perdagangan nuklir dengan negara lain tanpa harus menandatangani NPT, atau singkatnya disebut dengan “*NSG waiver*”, berkat *lobby* yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan sokongan dari Perancis, Rusia, dan Inggris terhadap *The Nuclear Suppliers Group* (Bano, 2015).¹⁵ Oleh karena adanya pengecualian tersebut, pemerintah Amerika Serikat akhirnya meloloskan *U.S-India civil nuclear agreement* pada tahun 2008 yang mana menjadi pencapaian kedua bagi India di tahun tersebut setelah menandatangani perjanjian pada bidang yang sama dengan Perancis di akhir bulan September (Department of Atomic Energy of India, 2018). Tidak berbeda halnya dengan hubungan India dan

¹⁵ *The Nuclear Suppliers Group* (NSG) merupakan komunitas negara-negara penyuplai bahan bakar dan teknologi nuklir yang didirikan pada tahun 1974. Komunitas ini didirikan sebagai respon terhadap uji coba nuklir pertama India di bulan Mei 1974 dan bertujuan untuk mencegah proliferasi senjata nuklir.

Jepang; normalisasi juga membuka lahan perbincangan yang lebih luas sehingga kedua negara dapat berbagi komitmen bersama di tahun 2006 untuk melakukan kerjasama dalam penggunaan energi nuklir. Bagi India, perbincangan tersebut merupakan bagian dari agenda diplomasi energi yang telah ia galakkan selama satu dasawarsa terakhir.¹⁶ Dari komitmen bersama inilah kemudian Jepang dan India akhirnya mencapai kesepakatan untuk melakukan *Cooperation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy* dengan menandatangani nota kesepahaman di tahun 2015.

Salah satu hal yang dapat dikatakan menarik Jepang menjadi lebih dekat dengan India di abad ke-21 yaitu ekonomi. India kembali menjadi sorotan dunia pada tahun 2003 namun bukan lagi karena tindakan kontroversial seperti di tahun 1998, melainkan pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang ditunjukkan dalam tabel berikut

Tabel 3.2 Pertumbuhan PDB India tahun 2000-2010



Sumber: World Bank. (tanpa tahun). *GDP growth (annual %)* diakses dari <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2010&locations=IN&start=1990&view=chart> pada 11/07/2017

Dapat dilihat pada tabel 3.2 bahwa India cenderung tidak mengalami pertumbuhan PDB dalam tiga tahun pertama dasawarsa 2000-an. Kondisi mulai berubah di tahun 2003 ketika pertumbuhan PDB India meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Sejak saat itu, pertumbuhan PDB India cenderung mengalami

¹⁶ Menurut Andreas Goldthau, diplomasi energi merupakan penggunaan kebijakan luar negeri oleh suatu negara untuk mengamankan akses terhadap pasokan energi di luar negeri dan untuk mempromosikan kerjasama dalam sektor energi

peningkatan hingga resesi ekonomi dunia di tahun 2008 yang membuatnya mengalami penurunan drastis. Meski demikian, PDB India mampu kembali tumbuh secara signifikan di tahun berikutnya dengan persentase yang tidak jauh berbeda dari persentase di tahun 2007. Pertumbuhan ekonomi India sejak tahun 2003 cukup mengesankan pihak tertentu seperti Jim O'Neil, mantan menteri keuangan Inggris, sebab pertumbuhan tersebut melampaui harapan pemerintah India maupun prediksi O'Neill. Dalam laporannya tentang prospek pertumbuhan ekonomi Brazil, Rusia, India, dan Tiongkok yang mewakili bagian penting dari produksi dan populasi dunia, O'Neill mengelompokkan keempat negara tersebut dalam pasar investasi menjanjikan yang dinilai akan mengejar dominasi kekuatan ekonomi barat secara kolektif. Kelompok tersebut ia sebut dengan singkatan "BRIC" yang kemudian diadopsi menjadi nama dari asosiasi lima negara dengan ekonomi besar yang sedang berkembang, BRICS; Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa.

Kedekatan dalam hubungan bilateral Jepang dan India juga tidak dapat dilepaskan dari kesamaan pandangan kedua negara terhadap Tiongkok. Meski sempat bertolak pandangan dalam uji coba nuklir Pokhran-II di tahun 1998, penilaian Jepang terhadap India mulai berubah sejak mencairnya ketegangan antar kedua negara oleh kunjungan Perdana Menteri Yoshiro Mori di tahun 2000. Perubahan tersebut salah satunya ditandai dengan penggunaan istilah "*global partnership*" yang sebelumnya hanya digunakan Jepang untuk menggambarkan hubungannya dengan Amerika Serikat (Horimoto, 2015). Penggunaan istilah tersebut menunjukkan bahwa terdapat perubahan signifikansi India dalam politik luar negeri Jepang; bahwa India dipandang sebagai mitra penting oleh Jepang untuk bekerjasama dalam isu-isu global dengan menitikberatkan pada tanggung jawab bersama untuk mempertahankan dan menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan (Mathur, 2012).

Penekanan yang dilakukan Mori pada nilai-nilai demokrasi dan kebebasan dilatarbelakangi oleh kekhawatiran Jepang terhadap Tiongkok. Sejak tahun 1990-an, negara tetangga Jepang tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan kekuatan militernya. Arus FDI yang meningkat sejak tahun 1992 membawanya menjadi perekonomian terbesar ketiga setelah Amerika Serikat

dan Jepang menurut *The International Monetary Fund* (BBC News, 2018). Disisi lain, Jepang justru ‘kehilangan’ dasawarsa tersebut dengan stagnansi ekonomi yang menyimpannya sejak tahun 1991.¹⁷ Guna mempermudah perbandingan, perbedaan tersebut dapat dilihat melalui catatan Bank Dunia mengenai persentase pertumbuhan PDB kedua negara dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.3 Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Jepang dan Tiongkok tahun 1990-1995

Tahun	Jepang	Tiongkok
1990	4.8%	3.9%
1991	3.4%	9.2%
1992	0.8%	14.2%
1993	-0.5%	13.8%
1994	0.9%	13%
1995	2.7%	10.9%

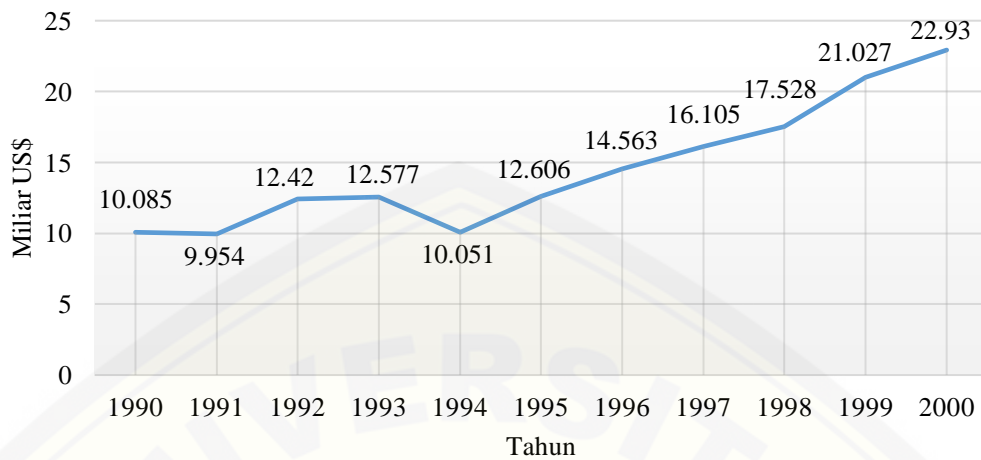
Sumber: The World Bank. 2018. *GDP growth (annual %)*. Diakses dari <https://data.worldbank.org/> pada 10/01/2019

Dapat dilihat dalam tabel 3.3 bahwa pada tahun 1990, pertumbuhan PDB Jepang masih lebih unggul dari Tiongkok meski hanya dengan selisih yang sedikit. Akan tetapi, perbedaan tersebut justru berbalik sejak tahun berikutnya. Pertumbuhan PDB Tiongkok melejit hingga 14.2% di tahun 1992, sedangkan Jepang mengalami penurunan hingga mencapai -0.5% di tahun 1993. Meski pertumbuhan PDB Jepang kemudian mengalami peningkatan sejak tahun 1994, namun Tiongkok tetap memimpin jauh dengan persentase pertumbuhan PDB-nya yang setidaknya empat kali lipat lebih banyak dari Jepang hingga tahun 1995.

Setelah mengalami pertumbuhan dalam ekonominya, Tiongkok turut melakukan peningkatan dalam pengeluaran militer. Hal ini sebagaimana yang dicatat oleh Bank Dunia sebagai berikut:

¹⁷ Peristiwa dimana Jepang mengalami stagnasi ekonomi selama 10 tahun, tepatnya sejak 1991 hingga 2000, yang dikenal dengan sebutan “The Lost Decade”.

Tabel 3.4 Pengeluaran Militer Tiongkok



Sumber: World Bank. 2019. *Military expenditure (current USD)* diakses dari <https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.CD?end=2010&locations=CN&start=1989&view=chart> pada 14/02/2019

Dapat dilihat pada tabel 3.4 bahwa pengeluaran militer Tiongkok cenderung fluktuatif dengan peningkatan yang tidak begitu signifikan selama empat tahun pertama 1990-an. Akan tetapi, setelah Tiongkok mengalami pertumbuhan ekonomi di awal dasawarsa tersebut, ia mulai mengalokasikan lebih banyak bagian dari PDB-nya untuk anggaran militer sejak tahun 1995. Meski relatif tidak banyak, namun dana yang dialokasikan untuk militer terus meningkat tiap tahunnya hingga menimbulkan keresahan pada banyak negara termasuk Jepang. Peningkatan dalam angka tersebut juga diiringi dengan peningkatan dalam perilaku militer khususnya di kawasan Asia Timur. Salah satunya yakni latihan militer yang diadakan di Selat Taiwan pada tahun 1995 guna mengintimidasi Taiwan selama pemilihan umumnya. Contoh lain datang dari serangkaian uji coba nuklir yang dilakukan dalam enam tahun pertama 1990-an. Meski Jepang telah beberapa kali memperingatkan pengaruh buruk yang dapat ditimbulkan terhadap hubungan bilateral kedua negara, namun Tiongkok seakan menutup telinga. Alhasil, timbul persepsi bahwa ia merupakan ancaman baik dalam lingkaran politik maupun lingkaran ekonomi. Persepsi tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Jepang dalam *Defense of Japan 2006*.

“many countries in the Asia-Pacific region, against the background of economic growth, have been expanding and modernizing their military

capabilities by increasing defense budgets and acquiring new equipment. Moves in this regard by China, a major power with significant economic and political influence in the region, are drawing particular attention from other countries (Japan Ministry of Defense, 2006)."

Ungkapan serupa juga dapat ditemukan dalam *Annual Report 2005-2006* yang diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan India.

"China's military modernisation, with sustained double-digit growth in its defence budget for over a decade, as also development of infrastructure in the India-China border areas, continues to be monitored. Close defense exchanges and nuclear and missile cooperation between China and Pakistan continue to elicit concern (Ministry of Defence of India, 2006)."

Pernyataan resmi dari kedua negara tersebut memperlihatkan kesamaan persepsi terhadap peningkatan kapasitas militer Tiongkok. Jepang dan India memandang aktivitas negara tetangga dalam satu kawasan tersebut sebagai sebuah ancaman terhadap keamanan nasional masing-masing. Hal ini tidak mengherankan mengingat masing-masing negara memiliki riwayat hubungan bilateral yang *conflictual* dengan Tiongkok. Melalui kesamaan tersebut, kedua negara dapat bertemu pada satu titik meski sempat berseberangan pendapat. Hal ini senada dengan penuturan Hiroshi Hirabayashi:

"There was an urgent need to put behind us the strained relations after India's nuclear test. The visit was necessary to bring our bilateral relations on a new, higher dimension, not only for the promotion of our bilateral relations, but also for the benefit of the rest of Asia and the international community at large (Mathur, 2012, hal. 25)."

Penuturan mantan duta besar Jepang untuk India tersebut menunjukkan bahwa terdapat persoalan yang menimbulkan keprihatinan lebih besar bagi Jepang sehingga ia perlu mengesampingkan perbedaan persepsinya terhadap uji coba nuklir Pokhran-II agar dapat merangkul India yang dinilai akan menunjang pencapaian kepentingan nasionalnya.

BAB V KESIMPULAN

Skripsi ini membahas tentang keputusan Jepang untuk melakukan kerjasama dalam penggunaan energi nuklir secara damai dengan India. Keputusan tersebut menjadi sebuah topik yang menarik untuk diteliti sebab Jepang merupakan sebuah negara dengan sikap politik yang membatasi penggunaan energi nuklirnya pada tujuan yang damai sehingga hanya berkenan untuk melakukan kerjasama nuklir dengan negara-negara anggota rezim non-proliferasi, sedangkan India bukan merupakan anggota dari rezim tersebut dan kukuh dalam pendiriannya untuk tidak menandatangani Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) maupun Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (CTBT). Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan “mengapa Jepang memutuskan untuk melakukan kerjasama dalam penggunaan energi nuklir dengan India?”.

Dalam penelitian ini, alat yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yakni *Decision Making Approach* yang dipopulerkan oleh Richard C. Snyder, H. W. Bruck, dan Burton Sapin. Menurut Sapin dkk, suatu negara melakukan sebuah tindakan karena adanya tujuan yang hendak dicapai. Adapun yang disebut dengan tindakan negara yaitu tindakan yang dilakukan oleh tokoh yang secara *de jure* memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dan bertindak atas nama negara. Tindakan tersebut merupakan cerminan dari keputusan akhir dalam proses pengambilan keputusan oleh unit-unit politik yang diakui dalam negara. Para pengambil keputusan sendiri bertindak atas kondisi serta faktor dalam *internal setting* dan *external setting* yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain.

Berdasarkan himpunan data yang telah dianalisis menggunakan *Decision Making Approach*, keputusan Jepang untuk melakukan kerjasama dalam penggunaan energi nuklir secara damai dengan India dipengaruhi oleh *internal setting* dan *external setting*. Dalam *internal setting*, faktor yang dinilai memiliki relevansi terhadap keputusan Jepang yakni *major institutional patterns*. Faktor tersebut mengacu pada *iron triangle* yang merupakan hubungan kolusif antara politisi, birokrat, dan kelompok penekan. Dalam keputusan Jepang, ketiga aktor

tersebut merujuk pada; 1) Perdana Menteri Jepang, 2) LDP selaku bagian dari koalisi yang berkuasa, dan 3) perusahaan-perusahaan Jepang penghasil teknologi nuklir yang terdiri dari Hitachi, Toshiba, dan Mitsubishi. Hubungan antara ketiga aktor tersebut dikatakan kolusif sebab para perusahaan Jepang penghasil teknologi nuklir menggelontorkan dana pada LDP dalam pemilihan umum 2012. Lalu ketika LDP memenangkan pemilihan umum tersebut, ia menciptakan “panggung” yang dapat mewujudkan kontrak nuklir para perusahaan tersebut dengan India. Dengan berlandaskan “panggung” tersebut, Perdana Menteri Abe kemudian mewujudkan kontrak nuklir mereka melalui pencapaian kesepakatan dengan India dalam *Cooperation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy*. Sedangkan pada *external setting*, terdapat dua faktor yang dinilai relevan terhadap keputusan Jepang untuk melakukan kerjasama dalam penggunaan energi nuklir secara damai dengan India. Faktor pertama yakni *non-human environment* yang mengacu pada komitmen India untuk meningkatkan penggunaan energi nuklir dalam negerinya. Komitmen tersebut dinilai relevan terhadap keputusan Jepang sebab ia menjadi potensi pasar bagi industri nuklir Jepang yang kehilangan pasar dalam negerinya pasca bencana nuklir Fukushima Daiichi. Faktor kedua yaitu *government action* yang datang dari tekanan Amerika Serikat dan Perancis terhadap Jepang untuk melakukan kerjasama dalam penggunaan energi nuklir secara damai dengan India. Tekanan tersebut dikarenakan dua perusahaan asal Amerika Serikat, General Electrics and Westinghouse Electric Company, dan sebuah perusahaan asal Perancis, Areva, terhambat untuk melangsungkan kontrak yang telah mereka kantong dengan India akibat keterkaitan komponen dan kepemilikan saham dengan perusahaan milik Jepang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Buku Elektronik/Book Section

- Hadi, S. (2004) *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta: Andi.
- Horimoto, T. (2015) "Japan-India Rapprochement and Its Future Issues," in *Toward the World's Third Great Power: India's Pursuit of Strategic Autonomy*. Tokyo: Iwanami Shoten. Tersedia pada:
https://www2.jiia.or.jp/en/pdf/digital_library/japan_s_diplomacy/160411_Takenori_Horimoto.pdf.
- Llyod, J. (1982) *Explaining Foreign Policy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Mas'oed, M. (1994) *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. II. Jakarta: LP3S.
- Mintz, A. dan DeRouen Jr., K. (2010) *Understanding Foreign Policy Decision Making*. New York: Cambridge University Press.
- Pedersen, J. D. (2016) "India as an Emerging Power in the Global Order: On Geo-Politics and Geo-Economics," in *Emerging Power, Emerging Market, Emerging Societies*. London: Palgrave Macmillan. doi:
https://doi.org/10.1007/978-1-137-56178-7_5.
- Rosenau, J. N. (1969) *International Politics and Foreign Policy*. New York: The Free Press.
- Sachdeva, G. (2015) *India's Emerging Energy Relations: Issues and Challenges*. Diedit oleh G. Pant. New Delhi: Springer. doi: 10.1007/978-81-322-2503-4.
- Scott, D. (2011) *Handbook of India's International Relations*. First. London: Routledge.
- Surajaya, I. K. (1994) "Segitiga Besi dan Pembaharuan Politik Jepang," in *Jurnal Lembaga Penelitian dan Pendidikan Kepada Masyarakat Tahun III No. 1*. Jakarta: Universitas Darma Persada.
- Varma, S. P. (2010) *Teori Politik Modern*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Weiss, L. (2007) "U.S.-INDIA NUCLEAR COOPERATION," *The Nonproliferation Review*. Taylor & Francis Group , 14(3), hal. 429–457. doi: 10.1080/10736700701611738.

Jurnal Ilmiah/ Makalah Penelitian/Laporan

- Akaha, T. (1984) "Japan's Non-nuclear Policy," *Asian Survey*, 24(8), hal. 852–877. doi: 10.2307/2644428.

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2014) *Perkembangan Ekonomi Indonesia: Triwulan I Tahun 2014*. Tersedia pada: https://www.bappenas.go.id/files/8014/0185/0277/KEMENTERIAN_PERENCANAAN_PEMBANGUNAN_NASIONAL_FINAL.pdf (Diakses: 28 Juli 2019).
- Bano, S. (2015) "India and Nuclear Suppliers Group (NSG) membership," *Global Change, Peace & Security*. Routledge, 27(2), hal. 123–137. doi: 10.1080/14781158.2015.998992.
- Center for Strategic & International Studies (2014) *Japanese Nuclear Policy Background Paper*. Tersedia pada: https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/140912_CSIS_Japan_Background_Paper.pdf (Diakses: 23 April 2019).
- Chanlett-Avery, E. dan Nikitin, M. B. (2009) *Japan's Nuclear Future: Policy Debate, Prospects, and U.S Interests*. Tersedia pada: <https://fas.org/sgp/crs/nuke/RL34487.pdf> (Diakses: 24 Oktober 2016).
- Colignon, R. dan Usui, C. (2013) "The Resilience of Japan's Iron Triangle," *Asian Survey*, 41(5), hal. 865–895. doi: 10.1525/as.2001.41.5.865.
- Dreiling, M. C. dan Nakamura, T. (2018) "A Nuclear Complex? A Network Visualization of Japan's Nuclear Industry and Regulatory Elite, 2006 to 2012." doi: 10.1177/2378023118769546.
- Edström, B. (2007) *The Success of a Successor: Abe Shinzo and Japan's Foreign Policy*. Sweden. Tersedia pada: http://isdpu.eu/content/uploads/publications/2007_edstrom_the-success-of-a-successor.pdf (Diakses: 28 September 2017).
- Ghosh, M. (2008) "India and Japan's Growing Synergy: From a Political to a Strategic Focus," *Asian Survey*, 48(2), hal. 282–302. doi: 10.1525/as.2008.48.2.282.
- Hemmings, J. dan Kuroki, M. (2013) "Shinzo Abe: Foreign Policy 2.0," *Harvard Asia Quarterly*, 1, hal. 8–15. Tersedia pada: https://www.researchgate.net/publication/262600812_Shinzo_Abe_Foreign_Policy_20.
- Hermawan, N. T. E. (2012) *Tantangan Kebijakan Energi Nuklir Jepang Pasca Insiden Fukushima Daiichi, Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Energi Nuklir V*. Jakarta. Tersedia pada: http://digilib.batan.go.id/ppin/katalog/file/1979-1208-2012-027_A04_NANANG_TRIAGUNG_INSIDEN_FUKUSHIMA.pdf.
- Horowitz, M. C. dan Narang, V. (2014) *A Modi-Fication of the India-Japan Relationship?, The German Marshall Fund of the United States*. Tersedia pada: <http://www.gmfus.org/publications/modi-fication-india-japan->

relationship (Diakses: 10 November 2018).

- International Energy Agency (2015) *India Energy Outlook, World Energy Outlook Special Report*. Tersedia pada: http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2015/IndiaEnergyOutlook_WEO2015.pdf.
- Jain, P. (2008a) *From Condemnation to Strategic Partnership: Japan's Changing View of India (1998-2007)*. 41. Tersedia pada: www.isas.nus.edu.sg (Diakses: 30 Oktober 2016).
- Jain, P. (2008b) "Westward Ho! Japan Eyes India Strategically," *Japanese Studies*. Routledge, 28(1), hal. 15–30. doi: 10.1080/10371390801939070.
- Jain, P. (2010) "Japan-India relations: Peaks and troughs," *Round Table*, 99(409), hal. 403–412. doi: 10.1080/00358533.2010.498977.
- Japan Ministry of Defense (2006) *Defense of Japan 2006*. Tersedia pada: https://www.mod.go.jp/e/publ/w_paper/pdf/2006/1-1-1.pdf (Diakses: 26 Mei 2019).
- Japanese Ministry of Economy, Trade, and Industry (2006) *The Challenges and Directions for Nuclear Energy Policy in Japan*. Tersedia pada: www.enecho.meti.go.jp/en/reports/pdf/rikkoku.pdf (Diakses: 17 Oktober 2016).
- Khan, S. A. (2012) "Japan's Nuclear Energy Debate: A Year After the Fukushima Nuclear Crisis," *IDSIA ISSUE BRIEF*, hal. 1–13. Tersedia pada: http://www.idsa.in/issuebrief/JapansNuclearEnergyDebate_Shamshad.
- Khan, S. A. (2014) "The Elusive India-Japan Nuclear Deal: It is time to bridge the differences to clinch the deal." Tersedia pada: <http://www.icwa.in/pdfs/PB/2014/PBshamdec2014.pdf>.
- Khan, S. A. (2016) "Indo-Japan Memorandum on Civil Nuclear Cooperation," *Economic and Political Weekly*, 51(14). Tersedia pada: <https://www.epw.in/journal/2016/14/web-exclusives/indo-japan-memorandum-civil-nuclear-cooperation.html>.
- Kingston, J. (2012) "Japan's Nuclear Village," *The Asia-Pacific Journal*, 10(37). Tersedia pada: <https://apjif.org/2012/10/37/Jeff-Kingston/3822/article.html> (Diakses: 9 November 2015).
- Kingston, J. (2013) "Abe's Nuclear Energy Policy and Japan's Future," *The Asia-Pacific Journal*, 11(34). Tersedia pada: <https://apjif.org/2013/11/34/Jeff-Kingston/3986/article.html>.
- Kingston, J. (2014a) "Abe-genda": nuclear export superpower, *The Japan Times*. Tersedia pada: <https://www.japantimes.co.jp/news/2014/01/25/world/abe-genda-nuclear-export-superpower/#.XLQCMugzbIX> (Diakses: 16 April 2019).

- Kingston, J. (2014b) "Abe's Nuclear Renaissance," *Critical Asian Studies*, 46(3), hal. 461–484. doi: 10.1080/14672715.2014.935136.
- Kuznick, P. (2011) *Japan's nuclear history in perspective: Eisenhower and atoms for war and peace*, *Bulletin of the Atomic Scientists*. Tersedia pada: <https://thebulletin.org/2011/04/japans-nuclear-history-in-perspective-eisenhower-and-atoms-for-war-and-peace-2/> (Diakses: 28 Desember 2016).
- Ministry of Defence of India (2006) *Annual Report 2005-2006*. doi: 10.1057/9780230374676_8.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan (2017a) *Chapter 3: Japan's Foreign Policy to Promote National and Worldwide Interests*. Tersedia pada: <https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2017/html/chapter3/c030104.html> (Diakses: 24 April 2019).
- Ministry of Petroleum and Natural Gas of India (2000) *India Hydrocarbon Vision-2025*. Tersedia pada: <http://petroleum.nic.in/sites/default/files/vision.pdf> (Diakses: 8 Mei 2019).
- Murphy, S. M. (2014) "Grassroots Democrats and the Japanese State After Fukushima," *Japanese Political Science Review*, hal. 19–37. doi: 10.15545/2.19.
- Paul, J. M. (2008) "India and Japan: Reluctant Idealism to Practical Realism," *South Asian Survey*, 1(2008), hal. 99–119. doi: 10.1177/097152310801500107.
- Permana, S. (2012) "Profil dan Kebijakan Nuklir Pasca Tragedi Fukushima," *Inovasi*, 19(4), hal. 4–11. Tersedia pada: <http://io.ppijepang.org/j/files/vol20-1/Inovasi-Vol20-1-Apr2012-pp4-11.pdf>.
- Sahu, A. (2016) "The Trajectories of India-Japan Relations: A Growing Convergence," in *ISA Asia-Pacific Conference*. Hong Kong, hal. 1–17. Tersedia pada: <http://web.isanet.org/Web/Conferences/AP Hong Kong 2016/Archive/c23e7d86-1829-4ef0-b242-c0a8c2ef6169.pdf>.
- Sundaram, P. K. (2013) "The Emerging Japan-India Relationship : Nuclear Anachronism, Militarism and Growth Fetish," 11(22). Tersedia pada: <https://apjff.org/2013/11/22/P-K-Sundaram/3949/article.html>.
- Takeshi, N. (2011) *The Tokyo Tribunal, Justice Pal and the Revisionist Distortion of History*, *The Asia-Pacific Journal*. Tersedia pada: <https://apjff.org/-Nakajima-Takeshi/3627/article.pdf> (Diakses: 29 Maret 2019).
- Takubo, M. (2011) "Nuclear or not? The complex and uncertain politics of Japan's post-Fukushima energy policy," *Bulletin of the Atomic Scientists*, 67(5), hal. 19–26. doi: 10.1177/0096340211421475.

Tanaka, Y. dan Kuznick, P. (2011) "Japan, the Atomic Bomb, and the 'Peaceful Uses of Nuclear Power,'" *The Asia-Pacific Journal | Japan Focus*, 9(18). Tersedia pada: <https://apjif.org/-Peter-J--Kuznick--Yuki-Tanaka/3521/article.pdf> (Diakses: 27 November 2016).

Situs Web

BBC Indonesia (2007) *PM Shinzo Abe mundur*, *BBC Indonesia*. Tersedia pada: http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2007/09/printable/070912_aberesign.shtml (Diakses: 30 September 2017).

BBC News (2018) *China profile - Timeline*, *BBC*. Tersedia pada: <https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13017882> (Diakses: 27 Januari 2019).

BBC News Indonesia (2012) *Shinzo Abe terpilih sebagai perdana menteri Jepang*, *BBC*. Tersedia pada: https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/12/121226_pm_jepang_abe (Diakses: 28 Juli 2019).

Cabinet Public Relations Office (2011) *Address by H.E. Mr. Yoshihiko Noda, Prime Minister of Japan, at the United Nations High-Level Meeting on Nuclear Safety and Security, Prime Minister of Japan and His Cabinet*. Tersedia pada: http://japan.kantei.go.jp/noda/statement/201109/22speech_e.html (Diakses: 20 April 2019).

Central Intelligence Agency (2014) *The World Factbook*, *Central Intelligence Agency*. Tersedia pada: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2243rank.html> (Diakses: 14 Oktober 2016).

Chellaney, B. (2007) *Japan, India: natural allies*, *The Japan Times*. Tersedia pada: https://www.japantimes.co.jp/opinion/2007/08/16/commentary/japan-india-natural-allies/#.XH_PHCgzbIX (Diakses: 4 Januari 2017).

Christensen, R. (tanpa tanggal) *Liberal-Democratic Party of Japan*, *Encyclopaedia Britannica*. Tersedia pada: <https://www.britannica.com/topic/Liberal-Democratic-Party-of-Japan> (Diakses: 12 April 2019).

Department of Atomic Energy of India (2018) *Important Agreements*, *Department of Atomic Energy of India*. Tersedia pada: <http://www.dae.nic.in/?q=node/75> (Diakses: 27 Desember 2018).

ElBaradei, M. (1999) *The Peaceful Uses of Nuclear Energy*, *International Atomic Energy Agency*. Tersedia pada: <https://www.iaea.org/newscenter/statements/peaceful-uses-nuclear-energy> (Diakses: 22 April 2019).

- Encyclopedia of World Biography (tanpa tanggal) *Shinzo Abe*, *Encyclopedia.com*. Tersedia pada: <https://www.encyclopedia.com/people/history/japanese-history-biographies/shinzo-abe> (Diakses: 3 Oktober 2017).
- Fackler, M. (2012) *Liberal Democratic Party Returns to Power in Japan*, *The New York Times*. Tersedia pada: <https://www.nytimes.com/2012/12/17/world/asia/conservative-liberal-democratic-party-nearing-a-return-to-power-in-japan.html> (Diakses: 30 September 2017).
- Gosal, D. (2013) *History of Economic Growth in India*, *International Policy Digest*. Tersedia pada: <https://intpolicydigest.org/2013/04/24/history-of-economic-growth-in-india/> (Diakses: 2 September 2017).
- International Energy Agency (2018) *Integrated Energy Policy*, *International Energy Agency*. Tersedia pada: <https://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/india/name-23687-en.php> (Diakses: 7 Mei 2019).
- Iron Triangle* (2012) *National University of Singapore*. Tersedia pada: <https://wiki.nus.edu.sg/display/JPE2012/Iron+Triangle> (Diakses: 17 November 2015).
- Jacobs, H. (2014) *The 17 Countries Generating The Most Nuclear Power*, *Business Insider*. Tersedia pada: <https://www.businessinsider.com.au/countries-generating-the-most-nuclear-energy-2014-3#17-japan-1> (Diakses: 27 April 2016).
- Japanese Ministry of Justice (2010) *Atomic Energy Basic Act*, *Japanese Law Translation*. Tersedia pada: <http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=2233&vm=04&re=02> (Diakses: 15 Mei 2016).
- Al Jazeera (2016) *Japan, India sign agreement on civil nuclear power*, *Al Jazeera*. Tersedia pada: <https://www.aljazeera.com/news/2016/11/japan-india-sign-agreement-civil-nuclear-power-161111164153096.html> (Diakses: 21 November 2016).
- Jiji Press English News Service (2012) "Profile of New Prime Min. Abe: A Political Thoroughbred Returns to Helm of Government," *Jiji Press English News Service*. Tersedia pada: <https://search.proquest.com/docview/1243393682?accountid=10910>.
- Kesavan, K. . (2016) *India-Japan Civil Nuclear Agreement: Differing Perceptions – Analysis*, *Eurasia Review*. Tersedia pada: <http://www.eurasiareview.com/19112016-india-japan-civil-nuclear-agreement-differing-perceptions-analysis/> (Diakses: 21 November 2016).
- Krishnan, A. (2014) *Coming full circle: Shinzo Abe in India*, *The Hindu*. Tersedia pada: <https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/coming-full-circle-shinzo>

- abe-in-india/article5614946.ece (Diakses: 7 Januari 2017).
- Langa, M. dan Bhattacharjee, K. (2017) *Shinzo Abe recalls grandfather's ties with Nehru*. Tersedia pada: <https://www.thehindu.com/news/national/abe-recalls-grandfathers-ties-with-nehru/article19685815.ece> (Diakses: 7 Januari 2017).
- Mathur, A. (2012) *India-Japan Relations: Drivers, Trends, and Prospects*. S. Rajaratnam School of International Studies. Tersedia pada: <https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/idss/india-japan-relations-drivers-trends-and-prospects/>.
- McBride, J. dan Xu, B. (2018) *Abenomics and the Japanese Economy, Council on Foreign Relations*. Tersedia pada: <https://www.cfr.org/background/abenomics-and-japanese-economy> (Diakses: 17 April 2019).
- McCann, L. (2013) "Japan's Energy Security Challenges: the World Is Watching," *ADF Journal*, February/M(190), hal. 83–94. Tersedia pada: http://www.defence.gov.au/ADC/Publications/Commanders/2012/08_SAP_Linda_McCann_-_Japan.pdf.
- Mie, A. (2013) *Protesters rail against Abe, The Japan Times*. Tersedia pada: <https://www.japantimes.co.jp/news/2013/03/11/national/protesters-rail-against-abe-reactors/#.XT5BEugzblW> (Diakses: 29 Juli 2019).
- Ministry of External Affairs of India (2005) *Joint Statement, India-U.S, Ministry of External Affairs of India*. Tersedia pada: https://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/6772/Joint_Statement_IndiaUS (Diakses: 29 Mei 2019).
- Ministry of External Affairs of India (2010) *Statement by the Prime Minister of India Dr. Manmohan Singh at the Nuclear Security Summit, Ministry of External Affairs of India*. Tersedia pada: <https://mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/561/> (Diakses: 29 Mei 2019).
- Ministry of Foreign Affairs of Japan (2006) *Joint Statement Towards Japan-India Strategic and Global Partnership*. Tersedia pada: <http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/india/pdfs/joint0612.pdf> (Diakses: 29 April 2016).
- Ministry of Foreign Affairs of Japan (2010) *Joint Statement Vision for Japan-India Strategic and Global Partnership in the Next Decade*. Tersedia pada: http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/india/pm1010/joint_st.html (Diakses: 29 April 2016).
- Ministry of Foreign Affairs of Japan (2012) *Recent Situation in India and Japan-India Relations*. Tersedia pada: <http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/india/index.html> (Diakses: 27 April

2016)

Ministry of Foreign Affairs of Japan (2015a) *Japan and India Vision 2025 Special Strategic and Global Partnership*. Tersedia pada: http://www.mofa.go.jp/s_sa/sw/in/page3e_000432.html (Diakses: 28 April 2016).

Ministry of Foreign Affairs of Japan (2015b) *Memorandum concerning the Agreement between the Government of Japan and the Government of Republic of India for Cooperation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy*. Tersedia pada: <http://www.mofa.go.jp/files/000117783.pdf> (Diakses: 14 Oktober 2016).

Ministry of Foreign Affairs of Japan (2017b) *Japan-India Relations (Basic Data), Ministry of Foreign Affairs of Japan*. Tersedia pada: <https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/india/data.html> (Diakses: 6 Januari 2017).

Mursitama, T. N. (2013) *Tantangan Abenomics, Binus University*. Tersedia pada: <http://ir.binus.ac.id/2013/08/30/tantangan-abenomics/> (Diakses: 30 September 2017).

Nelson, C. (2011) *“The Energy of a Bright Tomorrow”: The Rise of Nuclear Power in Japan, History Departments at The Ohio State University and Miami University*. Tersedia pada: <http://origins.osu.edu/article/energy-bright-tomorrow-rise-nuclear-power-japan> (Diakses: 11 Mei 2016).

Office of the Press Secretary (2005) *Joint Statement by President George W. Bush and Prime Minister Manmohan Singh, U.S. Department of State*. Tersedia pada: <https://2001-2009.state.gov/p/sca/rls/pr/2005/49763.htm> (Diakses: 13 Oktober 2018).

Okada, K. (2016) *Towards Indo - Japan nuclear agreement: Prospects and Challenges, Institute for Defence Studies and Analyses*. Tersedia pada: https://idsa.in/idsacomments/TowardsIndoJapannuclearagreementProspectsandChallenges_sakhan_240810 (Diakses: 24 Agustus 2018).

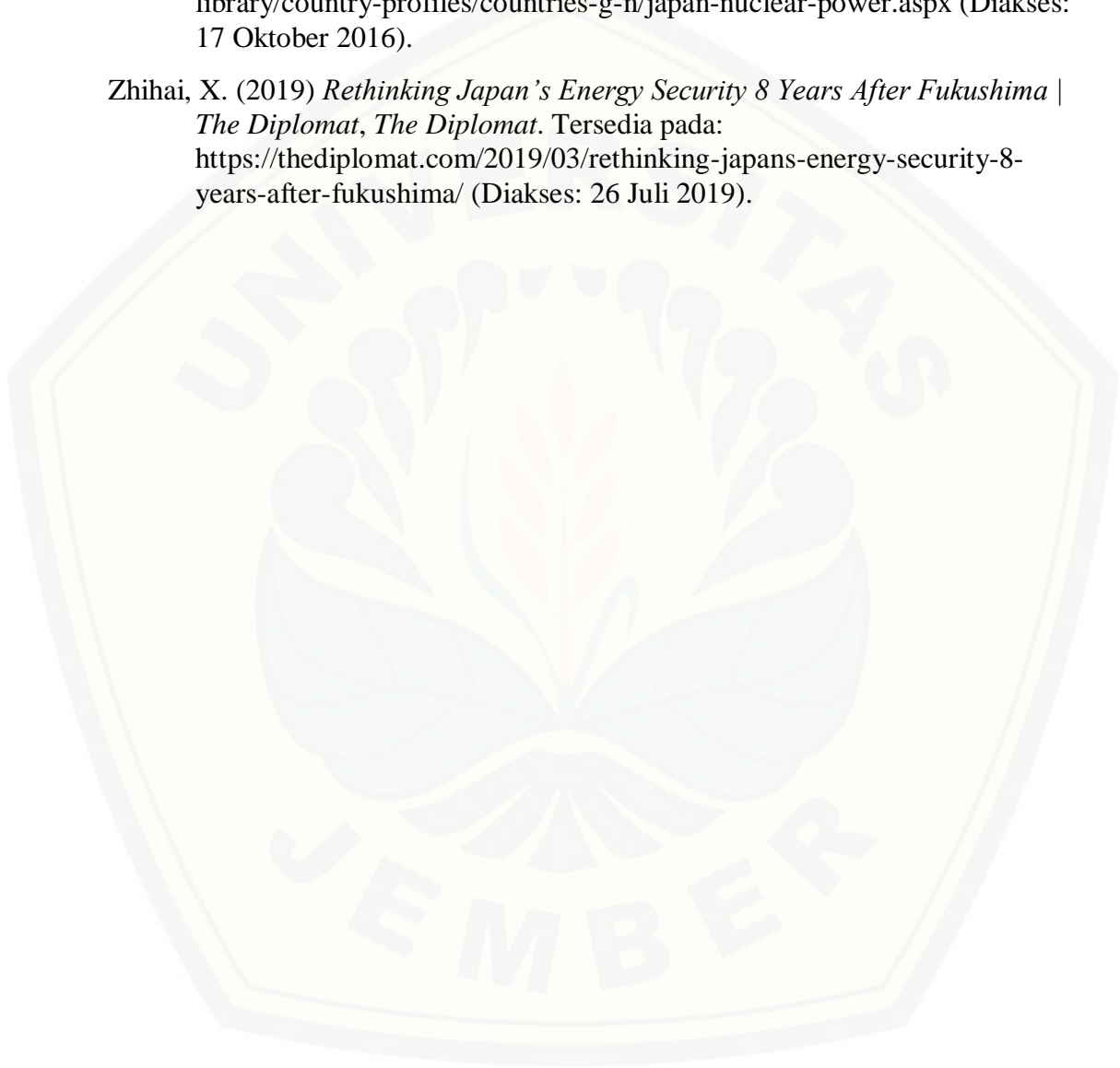
Onishi, N. dan Belson, K. (2011) *Culture of Complicity Tied to Stricken Nuclear Plant, The New York Times*. Tersedia pada: <https://www.nytimes.com/2011/04/27/world/asia/27collusion.html?pagewanted=all> (Diakses: 2 April 2019).

Onishi, N. dan Fackler, M. (2011) *Nuclear Plant Crisis, Crippling Mistrust, The New York Times*. Tersedia pada: <https://www.nytimes.com/2011/06/13/world/asia/13japan.html?pagewanted=all> (Diakses: 2 April 2019).

Pletcher, K. (tanpa tanggal) *Abe Shinzo, Britannica*. Tersedia pada: <https://www.britannica.com/biography/Abe-Shinzo> (Diakses: 29 September 2017).

- Sarel, M. (1996) *Growth in East Asia: What We Can and What We Cannot Infer*. 1. Washington D.C. Tersedia pada: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/issues1/issue1.pdf> (Diakses: 8 November 2018).
- Squassoni, S. dan Sekiguchi, Y. (2016) *Japan-India Nuclear Cooperation Agreement, Center for Strategic and International Studies*. Tersedia pada: <https://www.csis.org/analysis/japan-india-nuclear-cooperation-agreement> (Diakses: 14 April 2019).
- Tabuchi, H. (2011) *Japan Courts the Money in Reactors, The New York Times*. Tersedia pada: <https://www.nytimes.com/2011/10/11/business/global/shunning-nuclear-plants-at-home-japan-pursues-building-them-overseas.html> (Diakses: 17 April 2019).
- Taneja, K. (2013) *Lessons from Japan for India on Nuclear Energy, The Diplomat*. Tersedia pada: <https://thediplomat.com/2013/12/lessons-from-japan-for-india-on-nuclear-energy/> (Diakses: 1 Mei 2016).
- The Federation of Electric Power Companies of Japan (tanpa tanggal) *Japan's Vulnerable Energy Supply Situation, The Federation of Electric Power Companies of Japan*. Tersedia pada: http://www.fepec.or.jp/english/energy_electricity/supply_situation/index.html (Diakses: 14 Oktober 2016).
- The Japan Times (2015) *Civic groups, A-bomb survivors blast Japan-India nuclear power deal, The Japan Times*. Tersedia pada: <https://www.japantimes.co.jp/news/2015/12/12/national/civic-groups-a-bomb-survivors-blast-japan-india-nuclear-power-deal/#.W-bLIZMzbIX> (Diakses: 6 Mei 2015).
- The risky nuclear deal with India* (2015) *The Japan Times*. Tersedia pada: <https://www.japantimes.co.jp/opinion/2015/12/16/editorials/risky-nuclear-deal-india/#.W-bSZ5MzbiW> (Diakses: 15 Mei 2016).
- Toki, M. (2014) *Heavy lifting ahead in the Japan-India nuclear deal, Bulletin of the Atomic Scientists*. Tersedia pada: <https://thebulletin.org/2014/02/heavy-lifting-ahead-in-the-japan-india-nuclear-deal/> (Diakses: 1 Mei 2016).
- Tomohiko, S. (2009) "Japan's Nuclear Policy: Between Non-Nuclear Identity and US Extended Deterrence," (May). Tersedia pada: <https://nautilus.org/apsnet/japans-nuclear-policy-between-non-nuclear-identity-and-us-extended-deterrence/>.
- Tuke, V. (2013) *Expanding Strategic Horizons: Japan's Foreign Policy towards India, The Tokyo Foundation for Policy Research*. Tersedia pada: <http://www.tokyofoundation.org/en/articles/2013/expanding-strategic-horizons> (Diakses: 5 Mei 2016).

- United Nations (2015) *World Population Prospects: The 2015 Revision*. New York. Tersedia pada: https://esa.un.org/unpd/wpp/publications/files/key_findings_wpp_2015.pdf (Diakses: 13 Mei 2019).
- World Nuclear Association (2016) *Nuclear Power in Japan, World Nuclear Association*. Tersedia pada: <http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-g-n/japan-nuclear-power.aspx> (Diakses: 17 Oktober 2016).
- Zhihai, X. (2019) *Rethinking Japan's Energy Security 8 Years After Fukushima | The Diplomat, The Diplomat*. Tersedia pada: <https://thediplomat.com/2019/03/rethinking-japans-energy-security-8-years-after-fukushima/> (Diakses: 26 Juli 2019).



LAMPIRAN 1

Memorandum concerning the Agreement between the Government of Japan and the Government of the Republic of India for Cooperation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy

Memorandum
concerning the Agreement
between the Government of Japan
and the Government of the Republic of India for
Cooperation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy

The Government of Japan and the Government of the Republic of India have reached agreement on the Agreement between the Government of Japan and the Government of the Republic of India for Cooperation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy (here in after referred to as “the Agreement”).

The two Governments confirm that the Agreement will be signed after the technical details are finalised, including those related to the necessary internal procedures.

Shinzo Abe
Prime Minister of
Japan

Narendra Modi
Prime Minister of
the Republic of
India